

# SINERGI

Buletin Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Edisi 33/September 2018



Ikuti  
Kuis BPIW  
di hal.65



BPIW • Kementerian PUPR

## Penyusunan PJP, Ajang Konsolidasi Program Infrastruktur PUPR

BPIW Siapkan Rencana Khusus untuk Menyelaraskan  
Pembangunan dan Pelestarian



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)  
KEMENTERIAN PUPR**

# **INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI**



**Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: [humasbiw@gmail.com](mailto:humasbiw@gmail.com)

Telp. +6221-2751 5804



## Salam Sinergi .....

**P**embaca yang terhormat, Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini memasuki edisi ke-33, September 2018, kembali hadir untuk memberikan informasi yang menarik bagi pembaca.

Rubrik Kabar Utama kali ini membahas mengenai Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023. Beberapa hal dibahas dalam kabar utama, seperti isu strategis dan indikasi program pada periode tersebut di beberapa pulau di Indonesia seperti Jawa, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan.

Pada rubrik Laporan Utama dibahas mengenai pengembangan infrastruktur di kawasan cagar budaya di Indonesia. Beberapa hal yang dibahas pada rubrik itu, salah satunya mengenai perlunya perencanaan khusus terkait cagar budaya itu sesuai kajian akademis.

Dalam rubrik Wawancara ditampilkan Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ir. Harlina Sulistyorini, Msi. Ia menyampaikan beberapa hal, salah satunya mengenai pandangannya mengenai koordinasi yang dilakukan instansinya dengan BPIW selama ini. Edisi kali ini juga menghadirkan rubrik baru, yakni Jurnal Ilmiah. Rubrik tersebut mengulas hasil karya ilmiah para pakar dalam dan luar negeri.

Beberapa rubrik reguler juga tetap dihadirkan seperti rubrik Jalan-jalan yang membahas keindahan alam di Morotai Provinsi Maluku Utara. Rubrik reguler lainnya yakni Kilas BPIW, Teropong Media, dan Potret. Rubrik Sosok kali ini menampilkan Kepala Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat BPIW Kementerian PUPR, M. Salahudin Rasyidi, ST, MT.

Tak ketinggalan rubrik ringan tetap ditampilkan seperti Tips yang menampilkan mengenai menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Sajian karikatur dengan tokoh Bang Egi, dihadirkan dalam rubrik Obras (Obrolan Santai).

Rubrik yang berisi pengetahuan yang berhubungan dengan infrastruktur juga dihadirkan, yakni rubrik Serba-serbi. Rubrik ini membahas mengenai bendungan yang telah diresmikan pengoperasiannya dalam kurun waktu 2016-2018.

Kami berharap Buletin Sinergi selalu memenuhi harapan pembaca dalam memperkaya pengetahuan dan informasi mengenai pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Salam hormat,

**Pemimpin Redaksi**

# SINERGI

BULETIN BPIW

## Tim Penyusun:

**Pelindung:**  
Hadi Sucahyono

**Pengarah:**  
Firman Hatorangan Napitupulu

**Penasehat**  
Bobby Prabowo  
Iwan Nurwanto  
Kuswardono  
Agusta Ersada Sinulingga

**Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:**  
P. Yudiantoro

**Redaktur Pelaksana:**  
Shovich

---

**Editor :**  
Hendra Djamal  
Mutri Batul Aini

**Tim Pembuat Artikel:**  
Indira Dwi Kusumatuti  
Daris Anugrah  
Alis Listalatu  
Rian Farhan

**Sekretariat:**  
Untung Priyono  
Nur Wahyu

---

**Diterbitkan oleh:**  
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)  
Kementerian PUPR

---

**Alamat Redaksi:**  
Gedung G, BPIW Lantai 1  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com), [humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id)  
Website: [bpiw.pu.go.id](http://bpiw.pu.go.id)  
No. Telp. +6221-2751 5804

---

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:  
[humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com), [humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id)

---

Design : Heri Hito  
Infografis, layout & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi



---

**04 Kabar Utama:**  
Penyusunan PJP, Ajang Konsolidasi  
Program Infrastruktur PUPR



---

**58 Serba Serbi**  
Inilah Enam Bendungan Terbesar yang  
Diresmikan dalam Tiga Tahun Terakhir

# Edisi 33/September 2018

# daftar isi



12

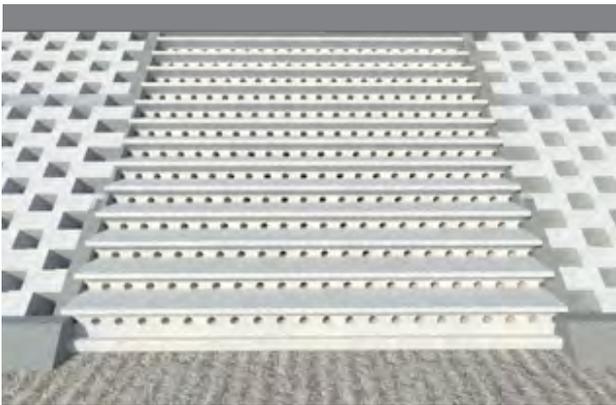
#### Wawancara:

Ir. Harlina Sulistyorini, MSi  
Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan  
Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan  
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

34

#### Lapsus:

BPIW Siapkan Rencana Khusus  
Pengembangan Cagar Budaya



60

#### Teknologi:

Blok Beton 3B, Teknologi Penahan  
Gelombang Pantai Modular

62

#### Potret:

Rapat Dengar Pendapat Kementerian  
PUPR dengan Komisi V DPR RI

# Penyusunan PJP, Ajang Konsolidasi Program Infrastruktur PUPR

**B**adan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat ini sedang membuat program-program infrastruktur PUPR melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2020 dan Program Jangka Pendek (PJP) 2021-2023. Kegiatan itu menjadi ajang konsolidasi program infrastruktur PUPR dengan program pemerintah dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).



Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, Kalbar

Sumber: Dok. Kemen PUPR



Pengembangan Jaringan Sistem Air Limbah Perpipaan Kota Solo.

Sumber: Kemen PUPR

**Penyusunan PJP, Ajang Konsolidasi Program Infrastruktur PUPR**

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat ini sedang membuat program-program infrastruktur PUPR melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023. Diharapkan, realisasi program infrastruktur yang dibuat melalui keterpaduan dengan berbagai pihak tersebut, dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mewujudkan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

Saat ini Indonesia tengah berada di periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III 2015-2019. Kemudian selanjutnya Indonesia akan memasuki RPJMN IV 2020-2024. Saat ini RPJMN IV tersebut sedang disusun secara teknokratik oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam masa transisi dari RPJMN III menuju RPJMN IV ini, Kementerian PUPR terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan

• mewujudkan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.

• Untuk mewujudkan hal itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR melalui Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR terutama pada Bidang Penyusunan Program, sedang membuat program-program infrastruktur PUPR melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023.

• Menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono sinkronisasi program melalui keterpaduan dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun Kementerian/ Lembaga lain, sangat diperlukan agar terwujudnya keterpaduan dalam pengembangan kawasan dengan pembangunan Infrastruktur sektor PUPR. Ia juga menekankan agar penyusunan sinkronisasi program dan pembiayaan itu dapat tetap mengacu pada tema RPJMN IV 2020-2024, yakni "Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif".

• Menurut Kepala Pusat Pemrograman dan

*Menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono sinkronisasi program melalui keterpaduan dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun Kementerian/ Lembaga lain, sangat diperlukan agar terwujudnya keterpaduan dalam pengembangan kawasan dengan pembangunan Infrastruktur sektor PUPR.*

Dalam mempersiapkan RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, juga disusun PJP yang diharapkan secara paralel dapat digunakan dalam proses penyusunan RPJMN dan renstra secara teknokratik.

Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto ada dua tujuan kegiatan tersebut, yakni pertama, konsolidasi program infrastruktur PUPR dengan program pemerintah daerah bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Kemudian tujuan yang kedua adalah sinkronisasi dengan cara mensinergikan dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung pada bulan September dan Oktober ini dilakukan di tujuh lokasi. Beberapa diantara dilaksanakan di Kota Palu, Manokwari, Solo, dan Balikpapan. Menurut Iwan pada pelaksanaan rapat koordinasi tahun ini terdapat proses yang berbeda, dimana dilaksanakan proses sinkronisasi tahun 2020 sebagai persiapan percepatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) yang mengantisipasi tahun politik 2019. "Percepatan pelaksanaan Pra Konreg perlu dilakukan mengingat akan ada hajatan nasional yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden serentak, pada April 2019 mendatang," ujar Iwan.

Selain itu menurut Iwan dalam mempersiapkan RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, juga disusun program jangka pendek yang diharapkan secara paralel dapat digunakan

dalam proses penyusunan RPJMN dan renstra secara teknokratik.

Dalam proses sinkronisasi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seperti mengenai upaya untuk mendorong proses pemrograman yang memperhatikan perubahan lingkungan strategis seperti 'Visi 2045' yang diturunkan menjadi Visium Kementerian PUPR 2030, perubahan ekonomi global akibat dari penguatan nilai dolar, dan pemanfaatan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam perencanaan dan pemrograman, dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi untuk pengurangan pengangguran dan antisipasi pemenuhan infrastruktur dalam era Revolusi Industri berbasis teknologi.

Menurut Iwan, pemerintah daerah perlu mulai mempertimbangkan fokus pertumbuhan ekonomi ke depan yang menitikberatkan daya saing di sektor industri, pertanian dan pariwisata. "Kita mendorong Pemerintah Daerah untuk juga memperhatikan pengembangan infrastruktur di kawasan-kawasan rawan bencana, penanganan konektivitas dan multimoda akibat



Jadwal Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program Keterpaduan Infrastruktur PUPR TA. 2020 dan TA. 2021-2023



Kampung Nelayan Beting, Kota Pontianak, Kalbar

Sumber: Kemen PUPR

pembangunan bandara dan pelabuhan baru, penanganan kelangkaan air, dan percepatan pengurangan *idle capacity* air baku," ungkap Iwan.

Ia berharap Pemerintah Daerah juga memperhatikan masalah peningkatan ketahanan pangan melalui pembangunan sistem irigasi sebagai lanjutan dari pembangunan waduk-waduk di RPJMN 2015-2019. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan daerah seperti percepatan penanganan akses universal infrastruktur permukiman dan pengurangan *backlog* perumahan dan inovasi pendanaan seperti melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Inovasi itu menurut Iwan penting dilakukan sehingga pendanaan infrastruktur tidak hanya mengandalkan APBN semata.

Adapun sumber indikasi program tahun 2020 berasal dari data Program Jangka Pendek 2019-2021, data program stok Tahun Anggaran 2019 Hasil Pra Konreg 2018, dan Residu Program dalam *Development Plan* 2015-2019. Selain itu bersumber dari usulan baru (jika ada) dan memenuhi seluruh kriteria, seperti belum pernah terbangun, mendukung pengembangan kawasan tematik/ prioritas, terpenuhinya *readiness criteria* terpenuhi, dan disetujui dalam forum *desk* pembahasan.

Sedangkan sumber data Program Jangka

• Pendek (PJP) 2021-2023 berasal dari indikasi  
 • program hasil dokumen perencanaan BPIW  
 • seperti Rencana Induk Pulau, Masterplan dan  
 • *Development Plan* (MPDP) Kawasan Strategis  
 • dan Wilayah Pengembangan Strategis  
 • (WPS), dan MPDP Kawasan Perkotaan dan  
 • Perdesaan, serta Residu dan Stok Program  
 • Jangka Pendek 2019-2021.

• Berikut uraian dari pelaksanaan pembahasan  
 • Penyusunan Sinkronisasi Program dan  
 • Pembiayaan Pembangunan Tahun 2020  
 • dan Jangka Pendek 2021-2023, di beberapa  
 • daerah :

#### • Berawal dari Kota Palu

• Pembahasan Penyusunan Sinkronisasi  
 • Program dan Pembiayaan Pembangunan  
 • Tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-  
 • 2023 tersebut dimulai dari Kota Palu, pada  
 • 3-5 September lalu. Dalam paparannya,  
 • Iwan menyampaikan bahwa ada beberapa  
 • program infrastruktur PUPR yang menjadi  
 • indikasi program di Pulau Sulawesi pada  
 • 2020 mendatang, seperti Pembangunan  
 • Bendungan Surumana di Sungai Palu -  
 • Lariang, Pembangunan Rumah Khusus  
 • Nelayan di Kecamatan Mapilli dan Kecamatan  
 • Campalagian, serta Pembangunan Jalan  
 • Gorontalo *Outer Ring Road* III. Sedangkan  
 • indikasi program infrastruktur PUPR untuk  
 • Pulau Sulawesi 2021-2023, beberapa  
 • diantaranya adalah Pembangunan  
 • Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional  
 • Mamminasata, Pembangunan jalan

*Adapun sumber indikasi program tahun 2020 berasal dari data Program Jangka Pendek 2019-2021, data program stok Tahun Anggaran 2019 Hasil Pra Konreg 2018, dan Residu Program dalam Development Plan 2015-2019.*

## Arah Kebijakan Jangka Menengah Pulau Jawa Tahun 2020-2024



- 1 Pengembangan kawasan strategis melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan dan penguatan konektivitas.
- 2 Pengembangan kawasan perkotaan yang berdaya saing dan kawasan perdesaan yang sejahtera.
- 3 Pengembangan Daerah Tertinggal melalui pemenuhan sarana prasarana dasar.
- 4 Penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

Palu-Parigi *Bypass*, Sulawesi Tengah, dan Penyediaan Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Parigi.

Kegiatan tersebut dihadiri beberapa kalangan seperti dari Bappeda Sulawesi Tengah, Bappeda Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Beberapa masukan diberikan berbagai pihak yang hadir, salah satunya Direktur Kerjasama dan Investasi dari pengelola KEK Palu Mohammad Agus Rahmat.

Menurutnya ada beberapa pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan KEK Palu yaitu Bendung Wombo untuk air bersih, *flyover* Pantoloan, rusunawa, drainase, pengolahan air limbah, dan dukungan infrastruktur PUPR untuk pengembangan Pelabuhan Pantoloan.

### Pembahasan di Kota Manokwari untuk Kepulauan Maluku dan Pulau Papua

Untuk pembahasan penyusunan sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan Tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023 untuk Kepulauan Maluku dan Pulau Papua, dilaksanakan di Kota Manokwari pada 13-14 September lalu. Fokus pembangunan infrastruktur PUPR mendukung kawasan prioritas nasional Papua seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai,

Kawasan Industri (KI) Buli, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

Isu strategis infrastruktur Papua dan Papua Barat yakni dukungan Infrastruktur terhadap pengembangan Kawasan Biak, dukungan infrastruktur terhadap kawasan perbatasan darat dan laut, dukungan pengembangan Trans Papua, dan dukungan Infrastruktur terhadap pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Isu strategis lainnya yakni dukungan Infrastruktur terhadap pengembangan KI Bintuni, dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Manokwari, dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kota Baru dan KEK Sorong, dan dukungan infrastruktur terhadap pengembangan KSPN Raja Ampat.

Beberapa Indikasi program infrastruktur PUPR di Pulau Papua tahun 2020 antara lain Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Misool Barat di Kabupaten Raja Ampat, Pembangunan Jembatan Perumai di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Pembangunan Rumah Swadaya di Kabupaten Maybrat. Sedangkan indikasi program infrastruktur PUPR Pulau Papua tahun 2021-2023 seperti lanjutan pembangunan pemecah gelombang Pantai Waisai Torang Cinta, Pembangunan Jembatan Pada Ruas

*Fokus pembangunan infrastruktur PUPR mendukung kawasan prioritas nasional Papua seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai, Kawasan Industri (KI) Buli, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.*

Merauke - Okaba - Buraka - Wanam, dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Bintuni.

Beberapa perwakilan Bappeda yang hadir seperti dari Bappeda Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, dan Maluku, memberikan masukan mengenai kebutuhan infrastruktur PUPR di masing-masing provinsi.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa pihak seperti Pengelola KEK Sorong PT. Malamoi Olom Wobok Sorong meminta dukungan infrastruktur PUPR yang dibutuhkan untuk dapat menunjang pengembangan KEK Sorong seperti Pengembangan Pelabuhan Ara dan SPAM Regional. Disamping itu, Pengelola KEK Morotai, PT. Jababeka Morotai juga mengharapkan dukungan infrastruktur PUPR seperti infrastruktur jalan, saluran drainase dan pedestrian. Program-program tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan KEK Morotai.

**Pembahasan di Kota Solo untuk Pulau Jawa**

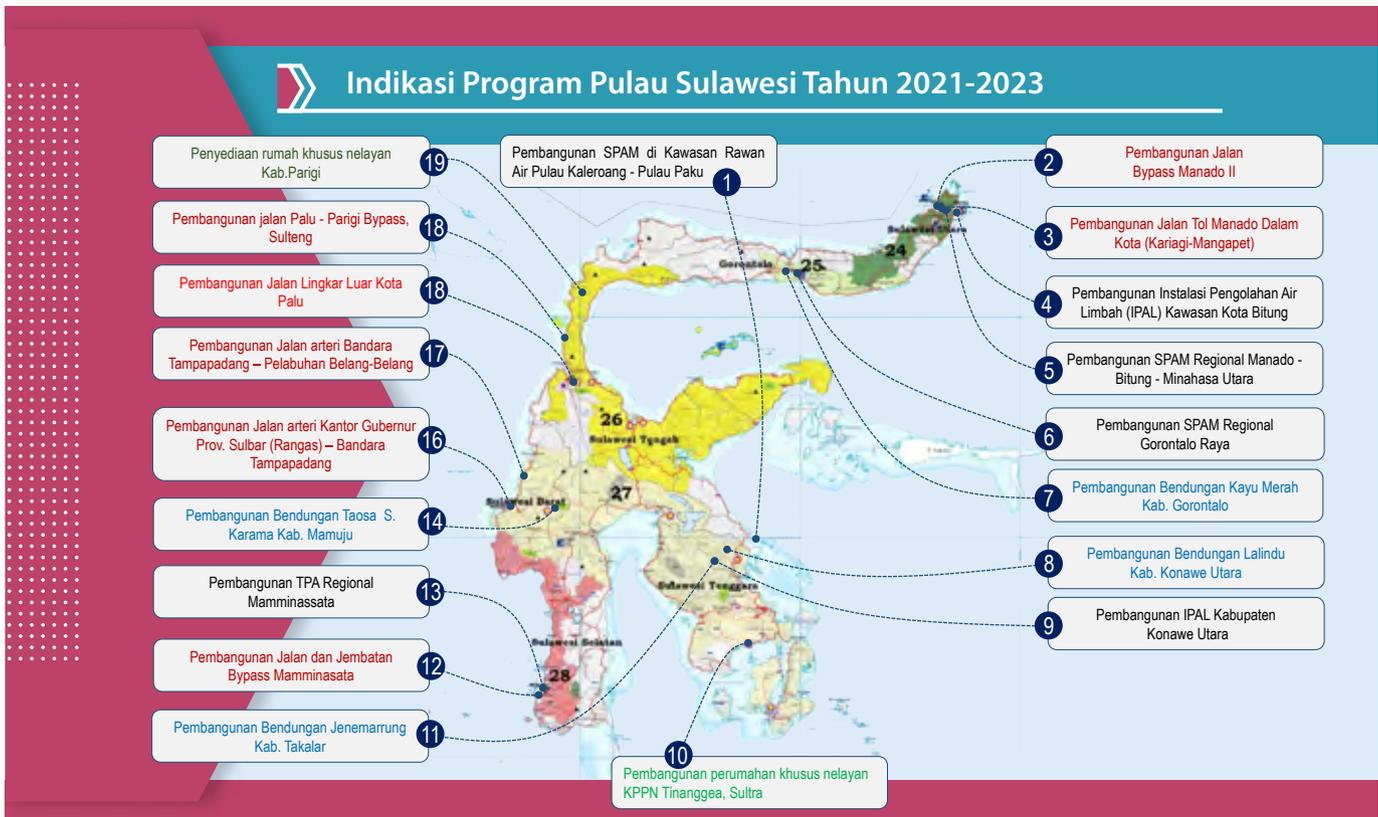
Kegiatan sinkronisasi program juga dilakukan untuk Pulau Jawa dan dilaksanakan di Kota Solo, 17-18 September lalu. Beberapa isu strategis pengembangan wilayah Pulau

Jawa yaitu penyelesaian pembangunan *Asian Highway Network*, langkah-langkah untuk mengurangi disparitas antara wilayah selatan dan utara Pulau Jawa-Bali, dan peningkatan layanan infrastruktur PUPR di daerah. Isu strategis lainnya di pulau ini yakni penanggulangan krisis air, penyelesaian proyek strategis nasional, merespon Tren Urbanisasi, dan pengurangan resiko / mitigasi bencana di Pulau Jawa-Bali.

Kemudian ada empat arah kebijakan jangka menengah untuk Pulau Jawa pada 2020-2024. Pertama, pengembangan kawasan strategis melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan dan penguatan konektivitas. Arah kebijakan yang kedua adalah Pengembangan kawasan perkotaan yang berdaya saing dan kawasan perdesaan yang sejahtera. Selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan daerah tertinggal melalui pemenuhan sarana prasarana dasar. Arah kebijakan jangka menengah yang keempat yakni penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

Beberapa isu program pembangunan infrastruktur PUPR untuk Pulau Jawa tahun 2020 yakni Penataan Kawasan Wisata Religi Dudan Kota Magelang, Pembangunan

*Beberapa isu strategis pengembangan wilayah Pulau Jawa seperti penyelesaian pembangunan Asian Highway Network, langkah-langkah untuk mengurangi disparitas wilayah selatan dan utara Jawa-Bali, dan peningkatan layanan infrastruktur PUPR di daerah.*



*Terdapat beberapa isu strategis infrastruktur untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, seperti contohnya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kota Baru Tanjung Selor.*

Jalan Malangsari menuju Kendenglembu di Kabupaten Banyuwangi, dan Pembangunan Rumah Susun untuk mendukung kegiatan di KI Kendal.

Sedangkan indikasi program pembangunan infrastruktur PUPR untuk Pulau Jawa di Tahun 2021-2023 diantaranya Pembangunan Bendungan Matenggeng di Kabupaten Cilacap, Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Tasikmalaya – Banjar, dan Pembangunan Rumah Susun Pekerja di Kota Semarang.

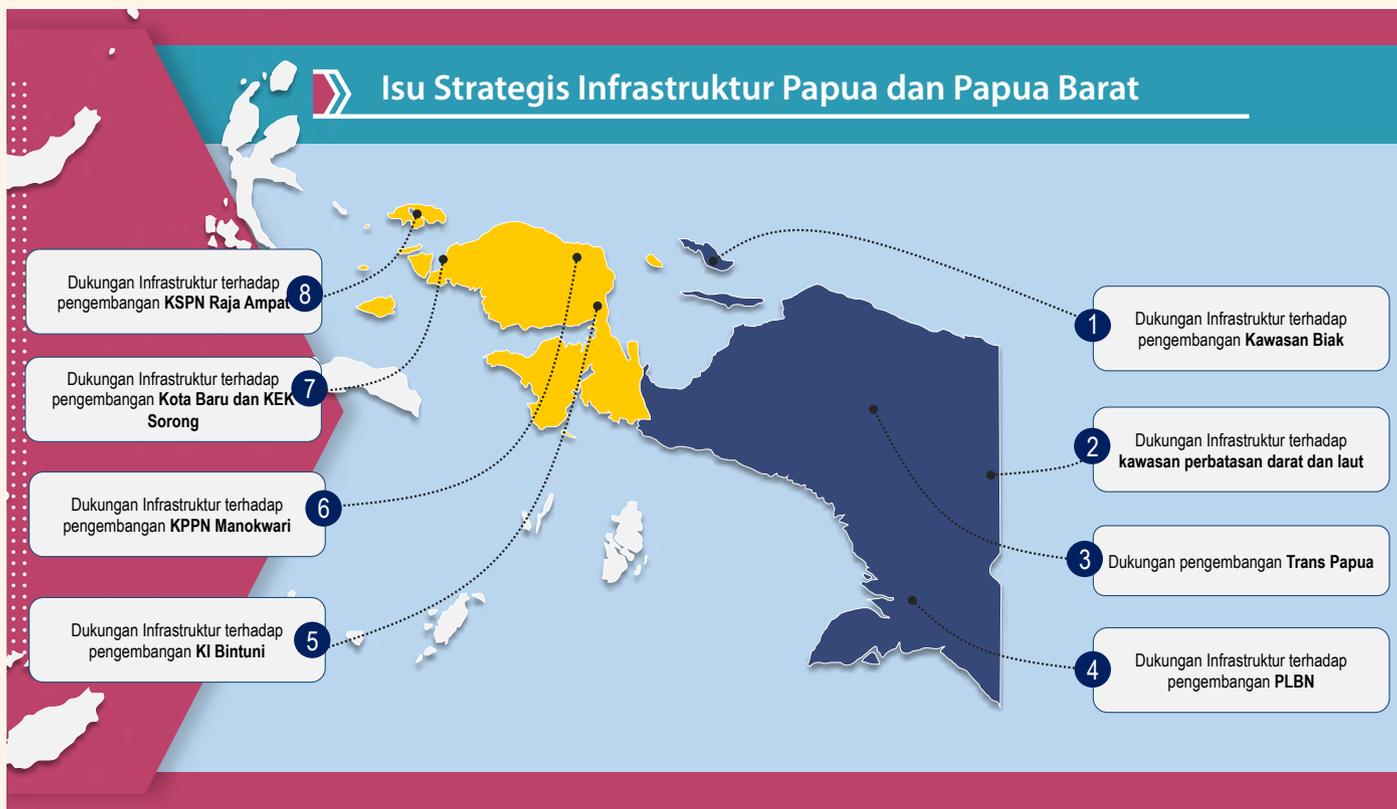
Sama halnya pertemuan di daerah lain, masing-masing Bappeda yang hadir, seperti Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, memberikan masukan terkait arah pengembangan wilayah serta kebutuhan infrastruktur PUPR di daerah masing-masing.

Pengelola KEK Tanjung Lesung, yakni PT. Banten *West Java Tourism Development* juga meminta Kementerian PUPR mempercepat Pembangunan Tol Serang menuju Panimbang dan *By-Pass* Lebak menuju Balaraja. Program-program tersebut diharapkan dapat segera terealisasi untuk mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung dan Kawasan Pantai Selatan Provinsi Banten.

Dalam diskusi itu juga dibahas mengenai dukungan infrastruktur PUPR untuk menunjang pengembangan Kawasan Strategis Borobudur, seperti akses dari Bandara *New Yogyakarta International Airport* dan kebutuhan air baku tambahan untuk mengembangkan tujuh desa yang berada disekitar Candi Borobudur. Pengembangan tujuh desa ini diperlukan untuk menjaga Kawasan Strategis Borobudur agar nilai seni dan budaya setempat tetap terjaga.

**Pembahasan di Kota Balikpapan untuk Pulau Kalimantan**

Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023 juga dilakukan di Kota Balikpapan pada tanggal 26-27 September lalu. Kegiatan tersebut membahas program infrastruktur PUPR untuk Pulau Kalimantan. Terdapat beberapa isu strategis infrastruktur untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, seperti contohnya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kota Baru Tanjung Selor. Isu strategis lainnya yakni dukungan infrastruktur terhadap pengembangan kawasan perbatasan, peningkatan konektivitas KIPI





Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kalimantan.

Sumber: BPIW

Tanah Kuning, dan dukungan infrastruktur terhadap pengembangan kawasan KPPN Berau dan KPPN Kutai Timur.

Selain itu juga terdapat isu strategis terkait dukungan infrastruktur terhadap pengembangan beberapa kawasan seperti Kawasan Metropolitan Sambo Tenggarong, pengembangan Kawasan Metropolitan Banjarbakula, pengembangan kawasan dan konektivitas KI Batulicin, dan pengembangan Kawasan KI Jorong.

Tidak hanya itu, untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ada beberapa isu strategis infrastruktur seperti peningkatan Konektivitas dari Palangkaraya menuju Batas Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya ada beberapa dukungan infrastruktur PUPR seperti dukungan terhadap kawasan lumbung pangan, pengembangan PLBN Jagoi Babang dan PLBN Jasa, pengembangan KI Mandor, dan peningkatan konektivitas KI Ketapang.

Ada beberapa kebijakan jangka menengah Pulau Kalimantan 2020-2024 yaitu peningkatan ketersediaan air sepanjang waktu untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi. Kebijakan lainnya adalah pengembangan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah, khususnya untuk pengembangan kawasan strategis, termasuk di dalamnya situs warisan Indonesia, situs warisan dunia,

kawasan pusaka, kawasan pariwisata, serta kawasan strategis ekonomi.

Sedangkan beberapa indikasi program pembangunan infrastruktur PUPR Tahun Anggaran 2020 untuk Pulau Kalimantan diantaranya Pembangunan Jalan Akses menuju Bandara Tebelian, Pengembangan SPAM di PKSN Sebatik di Kecamatan Sebat, dan Pembangunan Rusunawa di Kawasan KI Landak.

Sedangkan untuk indikasi program Tahun 2021-2023 untuk Pulau Kalimantan antara lain Pembangunan PLBN Jagoi Sei Pancang, Pengembangan Infrastruktur Jalan Nasional Akses Maloy, dan Pembangunan Bendung Batulicin. Beberapa indikasi program di Pulau Kalimantan Tahun 2021-2023 antara lain Pembangunan Embung Nanga Bayan, Pembangunan SPAM Kendawangan, dan Pelebaran Ruas Jalan Palangkaraya menuju Bukit Batu. Program ini diharapkan dapat mendukung pengembangan beberapa kawasan strategis yang ada di Pulau Kalimantan.

Masukan-masukan dari berbagai kalangan tersebut diharapkan dapat menyempurnakan Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023. **(Rakanda/Bowo/Mangapul/Redaksi)**

*Ada beberapa kebijakan jangka menengah Pulau Kalimantan 2020-2024 yaitu peningkatan ketersediaan air sepanjang waktu untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi.*



## Kerja Sama Dengan BPIW Harus Saling Melengkapi

**Ir. Harlina Sulistyorini, MSi**

*Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*

**P**erencanaan infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibuat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), tidak hanya membangun infrastruktur sektor PUPR secara terpadu, tapi juga mendukung program-program nasional yang dilaksanakan instansi lain, salah satunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(Kemendes PDTT). Plt. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendes PDTT, Ir. Harlina Sulistyorini, MSi mengakui kerja sama dengan BPIW sudah terjalin dengan baik. Ia berharap kerja sama kedua belah pihak dapat saling melengkapi, karena keterbatasan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Berikut wawancara "Buletin Sinergi" dengannya beberapa waktu yang lalu.

**Kawasan mana saja yang ditangani dan menjadi prioritas Direktorat Jenderal atau Ditjen PKP? Apa yang menjadi latar belakang pemilihan serta kriteria kawasan tersebut?**

Kawasan yang menjadi prioritas lokasi pelaksanaan kegiatan Ditjen kita yakni lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang telah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri). KPPN ini terdiri dari 40 lokasi Pusat Pertumbuhan yang tersebar di 60 kabupaten se-Indonesia. Penentuan lokasi KPPN tersebut karena dianggap lokasi-lokasi tersebut memiliki potensi yang cukup baik dan mendukung untuk pengembangan wilayah melalui mekanisme pembangunan kawasan perdesaan.

**Apa saja program prioritas dan unggulan Direktorat Jenderal PKP sampai tahun 2019 atau akhir RPJMN 2015-2019?**

Ditjen PKP memiliki beberapa kegiatan unggulan yang mendukung untuk pembangunan kawasan perdesaan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan seperti Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga lain.

Adapun beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKP seperti kegiatan pembangunan pasar kawasan, pembangunan

jalan poros antar desa, pembangunan embung, bantuan sarana dan prasarana air bersih, dan bantuan peralatan pasca panen/pengolahan untuk sektor pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan.

Selanjutnya kita memiliki program pendampingan kawasan perdesaan oleh pendamping kawasan, bantuan penguatan kelembagaan di tingkat kawasan perdesaan (BumDesa Bersama), kegiatan kemitraan untuk menjaring pihak-pihak lain untuk turut serta membangun kawasan perdesaan serta kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan.

**Apa strategi untuk membangun dan mengembangkan kawasan prioritas tersebut?**

Ada enam strategi yang dikembangkan untuk mendukung kawasan prioritas. Strategi pertama adalah penyusunan dokumen perencanaan yang melibatkan semua pihak terutama pemerintah daerah. Kedua, berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Bappenas, Kemendagri, BPIW, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk mendukung kegiatan pembangunan kawasan perdesaan secara bersama-sama.

Kemudian, strategi ketiga adalah berkoordinasi dengan unit-unit Kerja lain di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk bersama-sama mendukung lokasi kawasan perdesaan.

"Kawasan yang menjadi prioritas lokasi pelaksanaan kegiatan Ditjen kita yakni lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang telah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri)".

**PROFIL KTM MESUJI**  
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung

**PETA PUSAT KTM MESUJI**

**Sarana dan Prasarana**

**Infrastruktur Pusat KTM dan Pemerintahan:**

1. Tugu,Gapura
2. Boulevard
3. Kantor Pengelola
4. Kantor Camat
5. Taman Kota

**Infrastruktur Pendidikan:**

1. Rumah Pinter
2. SD, SMP, SMK

**Infrastruktur Sosial Keagamaan:**

1. Masjid
2. Islamic Center

**Infrastruktur Kesehatan:**

1. Puskesmas Rawat Inap
2. Unit Pengolahan Sampah
3. Saluran Air Bersih

**Infrastruktur Penunjang Produksi dan Pemasaran:**

1. Rice Milling Plant (RMP)
2. Industri Pupuk Organik Granular (IPOG)
3. Pasar basah dan kering
4. Pusat Bisnis

**Infrastruktur Lainnya:**

1. POLSEK
2. Wartel
3. Radio Komunitas

**Pengembangan Usaha Ekonomi**

**Komoditas Unggulan:**

Radi : 28.988 Ha (144.940 ton)  
Jagung : 1.753,5 Ha (10.521 ton)

**Sarana Ekonomi Terbangun:**

1. RMP (1,2 ton/jam)
2. IPOG

**BUMDes:**

19 BUMDes telah terbentuk (total 46 desa)  
PT. Mitra BUMDes Kawasan Transmigrasi Mesuji  
BUMDes sebagai Agen4G dan RPK

**Koperasi:**

8 koperasi

**Pasar:**

Pasar Senen KTM Mesuji

**Wirusaha:**

HW-Trans KTM Mesuji  
(25 anggota)

**Kebutuhan Kartu Tani**

Saat ini baru terdapat 927 petani

**Kebutuhan Industri**

Kapasitas RMP = 1,2 ton x 8jam x 200 hari = 1.920 ton GKG  
= 1.748 ton beras. Produktivitas 5 ton/ha, luas sawah yang dibutuhkan 344 Ha/MT

**Kebutuhan Modal RMP per MT (\$ bulan)**

1,2 ton x 8 jam x 200 hari x Rp 4.700 =Rp 9.024.000.000.

**Legalitas dan Informasi Umum**

Peta KTM : Peta Kab. Mesuji Tahun 2016  
Badan Pengelola : Ada  
Cakupan Wilayah : 46.560 Ha  
Pusat KTM : Desa Tanjung Mei Talang, Kec. Mesuji Timur

Jumlah Desa/LUPE : 7 desa dan 15 eks LUPE  
Jarak dari Kota Provinsi 255 km (aspal, rusak ringan)  
Jarak dari Kota Kabupaten 43 km (aspal, rusak sebagian)

Siveng Program Sektor:  
RPPM Kemendes, WPS Kem PUPR, KPPN

Gambar Contoh Infrastruktur Terbangun di Kawasan Transmigrasi KTM Mesuji, Provinsi Lampung

*"Dalam mengurangi ketimpangan/disparitas wilayah terutama untuk kawasan tertinggal, kita melakukan beberapa hal yakni identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketertinggalan wilayah"*

Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya yang wilayahnya masuk dalam lokasi KPPN agar berperan aktif dan berkomitmen membangun dan seirama dengan rencana pemerintah pusat. Itu strategi yang keempat.

Strategi yang kelima yakni memfokuskan bantuan-bantuan di Ditjen PKP untuk lokasi-lokasi prioritas agar target capaian kawasan perdesaan yang maju dan mandiri dapat segera tercapai. Strategi terakhir atau yang keenam untuk membangun dan mengembangkan kawasan prioritas adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**Bagaimana strategi dalam mengurangi ketimpangan/disparitas wilayah terutama untuk kawasan tertinggal?**

Dalam mengurangi ketimpangan/disparitas wilayah terutama untuk kawasan tertinggal, kita melakukan beberapa hal yakni identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketertinggalan wilayah dan melakukan koordinasi bersama semua pihak yang terlibat seperti kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, dan perguruan tinggi. Selain koordinasi, dicari beberapa alternatif solusi atas permasalahan yang menyebabkan ketertinggalan. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan afirmatif ke kawasan tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

**Untuk kawasan tertinggal dan transmigrasi, seperti apa program yang dilakukan?**

Program yang dilakukan yakni melakukan pendampingan terhadap para transmigran yang sudah tinggal dan mendukung terciptanya kawasan pertumbuhan baru dari lokasi transmigrasi.

**Dalam pengembangan kawasan perdesaan, sinergitas seperti apa yang dibutuhkan terutama dalam hal pembangunan infrastruktur perdesaan?**

Bagi saya, sinergitas yang dibutuhkan adalah menyiapkan dokumen perencanaan seperti dukungan *Detail Engineering Design* (DED) agar kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan efektif dan efisien. Dibutuhkan juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan infrastruktur perdesaan.

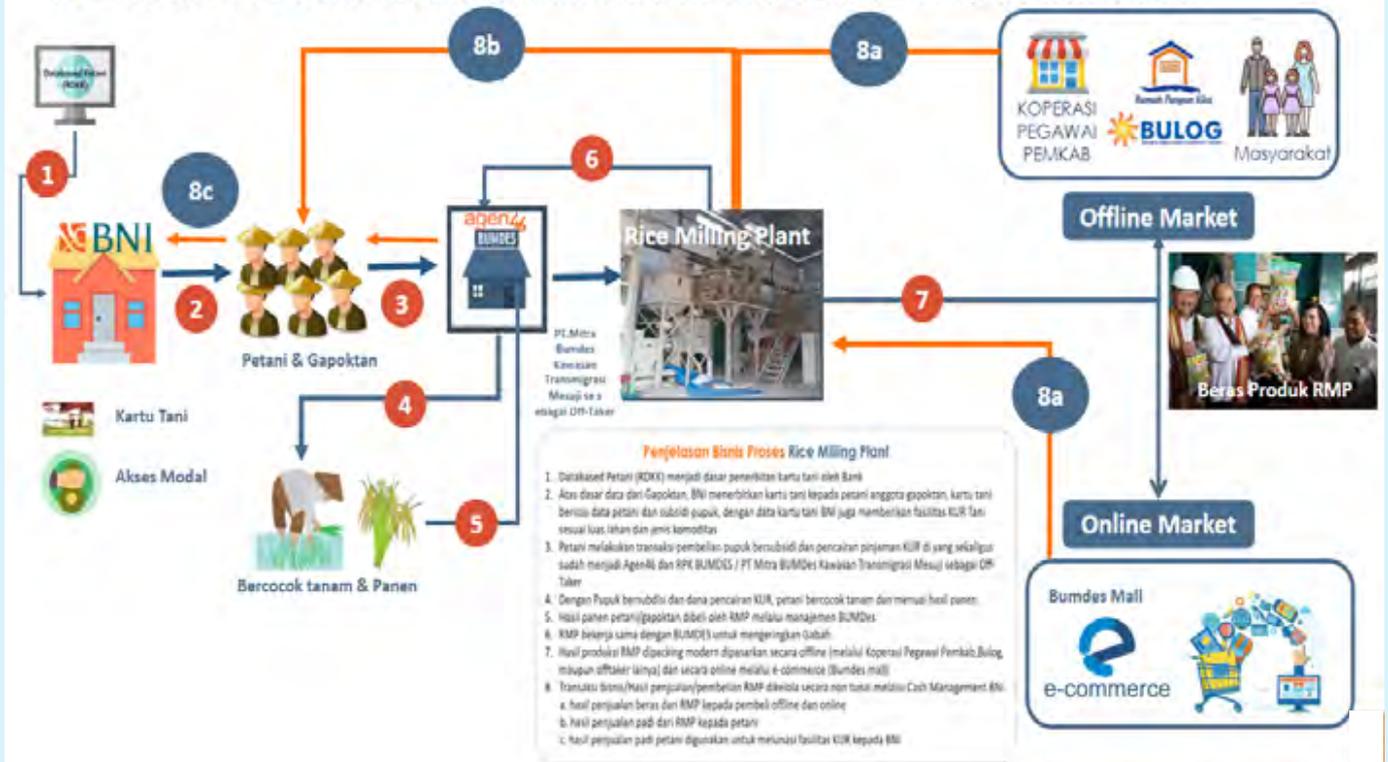
Jika memungkinkan kita melakukan perencanaan dan menetapkan target dan sasaran capaian kinerja bersama terhadap lokasi yang dikembangkan dan menjadi prioritas. Selanjutnya, memaksimalkan pendanaan masing-masing pihak untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan.

**Bagaimana selama ini Ditjen PKP dalam melakukan kerjasama dengan Kementerian**



# BUSINESS PROCESS RICE MILLING PLANT MENDUKUNG KORPORATISASI PETANI DI KAWASAN TRANSMIGRASI

DITJN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI  
KEMENDES, PPT, DAN TRANSMIGRASI



Gambar Bisnis Plan Pengembangan Agribisnis-agroindustri (Komoditas Beras) dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi

## PUPR, terutama dengan BPIW ?

Kegiatan bersama yang dilakukan selama ini dengan Kementerian PUPR terutama dengan BPIW adalah kerja sama penyusunan dokumen perencanaan terhadap lokasi-lokasi KPPN serta secara rutin melakukan koordinasi terkait dengan penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan.

## Bagaimana Ibu melihat peran dari BPIW dalam membuat perencanaan infrastruktur sektor PUPR untuk kawasan perdesaan?

Saya melihat, peran BPIW dalam membuat dokumen perencanaan untuk kawasan perdesaan sudah cukup detail.

Namun jika dilihat lebih mendalam, BPIW memfokuskan rencana kegiatan kepada sektor fisik/infrastruktur. Menurut saya akan lebih baik lagi jika perhatian sektor sosiologis mendapat porsi perhatian yang lebih dari BPIW. Dengan kombinasi perhatian kepada dua sektor tersebut, maka diharapkan hasil capaian pembangunan kawasan perdesaan akan lebih maksimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

## Terkait perencanaan infrastruktur, apa masukan Ibu bagi BPIW?

Masukan bagi BPIW yakni untuk kegiatan koordinasi yang sifatnya lintas sektor lebih ditingkatkan, karena garis merah target capaian Kementerian/Lembaga itu sama, yakni pembangunan kawasan perdesaan yang maju dan mandiri. Oleh sebab itu dengan seringnya dilakukan koordinasi dan kerja sama, diharapkan dapat mengurangi jarak dan menguatkan satu sama lain.

## Apa yang Ibu harapkan dari sinergitas Kemendes PDDT dengan BPIW?

Dengan sinergi kerja sama antara Kementerian PDDT dan BPIW, diharapkan kedua pihak dapat saling melengkapi, karena keterbatasan tugas pokok dan fungsi masing-masing. BPIW yang fokus pada pengembangan infrastruktur perdesaan, dapat ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan pendukung yang sifatnya penguatan kelembagaan kelompok yang dilakukan Kemendes PDDT. **(Daris/Hendra)**

*Dengan sinergi kerja sama antara Kementerian PDDT dan BPIW, diharapkan kedua pihak dapat saling melengkapi, karena keterbatasan tugas pokok dan fungsi masing-masing.*

# Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 4 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini potongan pemberitaan terpilih pada bulan September.

Kliping berita BPIW dapat di download di: [bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook](http://bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook)

## Pariwisata Jadi Harapan

Pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menghasilkan devisa. Pemerintah menggenjot sektor ini untuk meraih 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah kondisi transaksi berjalan yang defisit, neraca perjalanan yang surplus menjadi harapan. Neraca perjalanan dihitung dari kegiatan ekonomi wisatawan yang masuk ke Indonesia dan wisatawan domestik yang ke luar negeri.

Berdasarkan Neraca Pembayaran Indonesia yang dikutip Kompas, Minggu (2/9/2018), neraca perjalanan surplus 3,639 miliar dollar AS pada 2016. Pada 2017, surplusnya meningkat menjadi 4,231 miliar dollar AS.

Meski demikian, surplus pada triwulan I-2018 yang sebesar 1,681 miliar dollar AS menyusut menjadi 1,106 miliar dollar AS pada triwulan II-2018.

Surplus yang menyusut pada triwulan II-2018 ini disebabkan wisatawan domestik yang berkunjung ke luar negeri semakin banyak dengan pengeluaran yang semakin besar. Sebaliknya, pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia semakin kecil.

Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah kunjungan wisman pada Januari-Juni 2018 sebanyak 7,53 juta kunjungan atau meningkat 13,08 persen dibandingkan dengan Januari-Juni 2017. Pemerintah menargetkan 17 juta wisman ke Indonesia tahun ini dengan perolehan devisa 17 miliar dollar AS.

Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B Sukamdani menyampaikan, kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara berdampak positif bagi sektor pariwisata Indonesia. Kebijakan ini meningkatkan kunjungan wisman.

Wisawatan China, misalnya, meningkat signifikan, dari 1,052 juta orang pada 2014 menjadi 1,9 juta orang pada 2017.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Bali pekan lalu, mengatakan, pariwisata adalah sektor yang paling cepat menghasilkan devisa. Pariwisata juga mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi kemiskinan.

Oleh karena itu, upaya pemerintah menggenjot pariwisata dengan menargetkan 20 juta kunjungan wisman pada 2019 akan memberi pemasukan bagi negara. Kunjungan wisman sebanyak itu diperkirakan akan menyumbang devisa hingga 23 miliar dollar AS.

Dua kegiatan besar yang diproyeksikan menghasilkan devisa tahun ini adalah Asian Games 2018 pada 18 Agustus-2 September 2018 dan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia pada 12-14 Oktober.

### Mengejar

Secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan, Kementerian Pariwisata berupaya mengejar tambahan 2,5 juta wisman hingga akhir 2018. Dengan menghitung rata-rata kunjungan wisman setiap bulan, wisman yang datang ke Indonesia tahun ini diperkirakan 15 juta kunjungan. Padahal, target tahun ini 17 juta kunjungan wisman.

"Tambahan 2 juta wisman itu-lah yang akan dikejar," katanya.

Pemerintah juga mendorong pengembangan pariwisata prio-

### Perolehan Devisa Indonesia Per Komoditas\*

Pariwisata memiliki potensi untuk mendorong penerimaan devisa



\*Berdasarkan nilai ekspor komoditas dan jasa pada Neraca Pembayaran Indonesia

Source: BPS, Kompas.com



ritas di Tanah Air melalui kebijakan fiskal. Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, pemerintah menyiapkan anggaran melalui skema dana alokasi khusus (DAK).

"Pemanfaatan DAK nonfisik untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal di bidang pariwisata, sementara DAK fisik dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur penunjang kawasan pariwisata," kata Mardiasmo.

Dalam RAPBN 2019, tambah Mardiasmo, DAK nonfisik untuk pariwisata dialokasikan Rp 213 miliar, sedangkan DAK fisik Rp 1 triliun.

Insentif fiskal, tambah Mardiasmo, juga dioptimalkan untuk badan usaha di kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata, di antaranya dengan menghilangkan pungutan cukai dan kebijakan restitusi pajak tanpa verifikasi terlebih dahulu.

Terkait pemasaran dan promosi, Hariyadi menyarankan agar Pemerintah Indonesia genar memasarkan destinasi di setiap pameran wisata. Dengan cara itu, wisman akan melirik semakin banyak destinasi wisata.

Sementara pemilik Amabel Travel, Adinda Amabel, menyampaikan, wisman yang datang ke Indonesia umumnya memilih menikmati wisata alam.

(MED/ARN/COK/DIM/EI2)



Ulasan Teropong Media edisi kali terkait berita dari Kompas, Senin 3 September 2018 yang diberi judul “Pariwisata Jadi Harapan”. Berikut ulasannya :

## Kontribusi Nyata BPIW Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Dalam tulisan di media itu disebutkan bahwa Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pariwisata adalah sektor yang paling cepat menghasilkan devisa. Pariwisata juga mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi kemiskinan. Disebutkan juga bahwa pemerintah menggenjot sektor ini untuk meraih 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019.

Sehubungan dengan hal itu, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut berkontribusi nyata dalam mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia dan juga mendukung pencapaian target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara, melalui penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP). Penyusunan ITMP di tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), dan Mandalika/Lombok (Nusa Tenggara Barat).

Bagi BPIW, mengawal penyusunan ITMP merupakan wujud dari kepercayaan pemerintah, mengingat penyusunan ITMP diluar dari tugas BPIW sehari-hari yakni merencanakan pembangunan infrastruktur

PUPR. Dalam menyusun ITMP tersebut BPIW selalu berkoordinasi dengan instalasi lain seperti Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Kunci dalam mengoptimalkan pengembangan sebuah destinasi wisata adalah 3A, yakni Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas. Untuk “A” yang pertama, yakni “Atraksi” berarti kawasan wisata tersebut harus memiliki sesuatu yang menjadi daya tarik, misalnya tarian maupun prosesi adat istiadat.

Kemudian “A” yang kedua adalah “Aksesibilitas” atau sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan ke destinasi pariwisata. Sedangkan “A” yang ketiga adalah “Amenitas” atau fasilitas lain seperti toko kerajinan tangan khas daerah.

Program infrastruktur yang dibuat dan direalisasikan Kementerian PUPR akan disinergikan dengan kementerian/lembaga lain. Sehingga ITMP akan menjadi dokumen perencanaan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung keterpaduan pengembangan pariwisata secara optimal.

Dokumen ini juga akan dijadikan sebagai *guidance* bagi sektor-sektor terkait pariwisata agar mampu memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ITMP juga akan berperan sebagai peta program kebutuhan infrastruktur guna mendukung pengembangan sektor pariwisata pada beberapa titik prioritas. **(Hendra Djamal)**



Danau Toba

Sumber: Shutterstock

# BPIW dan Bappenas Siapkan Perencanaan Pengembangan 40 Kota Berkelanjutan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) saat ini menyiapkan perencanaan pengembangan terpadu dan terintegrasi terhadap 40 kota sebagai kota berkelanjutan di Tanah Air.

Hal itu terungkap dalam pembahasan *"National Urban Development Program (NUDP)"* yang dipimpin langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono didampingi jajarannya dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas, Rudy S. Prawiradinata, Ph.D. di Kantor BPIW, Jakarta, Selasa (4/9).

"NUDP dilaksanakan untuk memastikan dukungan pembangunan kota secara terpadu melalui perumusan kebijakan perkotaan nasional," ungkap Hadi. NUDP memiliki empat komponen

utama yakni penyiapan kebijakan, kelembagaan, dan finansial, sistem informasi dan perencanaan, fasilitasi pembangunan perkotaan, serta *Masterplan* Pembangunan Perkotaan.

Perumusan kebijakan perkotaan nasional sendiri, lanjut Hadi, terdiri dari manajemen perkotaan dan

---

**"NUDP dilaksanakan untuk memastikan dukungan pembangunan kota secara terpadu melalui perumusan kebijakan perkotaan nasional," ungkap Hadi.**

---

kebijakan keuangan, meningkatkan perencanaan dan informasi perkotaan, infrastruktur perkotaan dan mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan perkotaan agar kota-kota tumbuh menjadi kota yang berkelanjutan.

Kemudian juga, lanjutnya, untuk mengoptimalkan sistem tata ruang

perkotaan nasional, mengembangkan rencana infrastruktur serta mempersiapkan proyek pembangunan kota yang sistematis dalam menciptakan kota yang berciri khas, layak huni, hijau, dan cerdas. Selain itu, memfasilitasi lembaga pelaksana dalam menciptakan program tahunan kementerian/ lembaga (K/L) secara terpadu.

Dalam pelaksanaan pengembangan kota melalui NUDP, ungkap Hadi, dipilih 40 kota yang memenuhi kriteria tertentu. Beberapa kriteria tersebut antara lain periode kepala daerah, ukuran kota, dan fungsi kota.

Adapun 40 kota tersebut antara lain Denpasar, Binjai, Bitung, Manado, Tangerang Selatan, Medan, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Surabaya, Semarang, Mataram, Bontang, Tomohon, Depok, Banjarbaru, Palu, Jakarta, Batam serta Bandar Lampung.

"Kemudian ada Ternate, Cimahi, Tanjung Balai, Solok, Sungai Penuh, Surakarta, Cilegon, Banda



Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono bersama Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas, Rudy S. Prawiradinata.

Sumber: Dok. BPIW

Aceh, Kendari, Jayapura, Cirebon, Pekanbaru, Tasikmalaya, Sabang, Langsa, Magelang, Blitar, Tebing Tinggi, Pasuruan, dan Metro,” ungkap Hadi.

Pelaksanaan NUDP akan melibatkan banyak pihak dan didukung Bank Dunia. Hal ini menurut Hadi akan mempercepat peningkatan kota menjadi lebih berkelanjutan, berciri khas, layak huni, hijau, dan cerdas.

Di tempat yang sama, Rudy S. Prawiradinata mengatakan, NUDP melibatkan Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah.

“NUDP akan menghasilkan RTRW yang dilengkapi dengan *Spatial Development Framework* (SDF), RDTR yang dilengkapi dengan *Strategic Area Framework* (SAF),

dan *Capital Investment Planning* (CIP), lanjut Rudy.

Tiga pihak yang rencananya akan berperan sebagai *Center Project*

---

“Pengembangan kota memang perlu dilakukan terintegrasi banyak pihak. Termasuk, mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam mengembangkan kotanya lebih baik,” jelas Rudy.

---

*Management Unit* (CPMU) adalah BPIW (Kementerian PUPR), Deputi Bidang Pengembangan Regional (Kementerian PPN/ Bappenas), dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Kementerian Dalam Negeri).

CPMU ini nantinya akan dibantu oleh *Project Implementation Unit* (PIU) yang terdiri dari unit Eselon II dari beberapa K/L seperti Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR, dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kemudian juga melibatkan Badan Pusat Statistika (BPS), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Pengembangan kota memang perlu dilakukan terintegrasi banyak pihak. Termasuk, mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam mengembangkan kotanya lebih baik,” jelas Rudy. **(Ris/Eko/infoBPIW)**

# Susun ITMP, BPIW Himpun Masukan Pemerintah Daerah

Guna memberikan gambaran umum mengenai apa yang telah dilakukan pada bulan pertama dari penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, digelar pembahasan Laporan Pendahuluan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, di Magelang Senin (3/9).

Menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Kuswardono, kegiatan tersebut juga untuk mengomunikasikan rencana kerja tim konsultan terutama kepada Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyusunan ITMP tersebut, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Komunikasi rencana kerja tim tersebut juga dilakukan dengan kementerian atau lembaga lain yang juga turut hadir pada acara tersebut seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pariwisata.

Ia menilai kegiatan tersebut menghasilkan banyak masukan yang dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu yang dibantu Bank Dunia tersebut. "Satu bulan setelah ini, akan

ada *baseline analysis* dan skenario pertumbuhan kawasan. Itu yang paling penting. Kita akan melihat struktur destinasi Kawasan Pariwisata Borobudur dan perspektif yang lebih luas," ungkapnya. Kuswardono juga menyatakan kajian yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). "Nantinya pihak konsultan akan mereview dan menilai dari beberapa obyek atraksi terkait Borobudur yang bisa dikembangkan,"

Tujuan ITMP adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses dari infrastruktur dasar dan layanan pariwisata, memperkuat ekonomi lokal yang terkait dengan pariwisata, dan menarik investasi swasta di destinasi wisata terpilih di Indonesia.

ucapnya.

Kuswardono berharap dari semua masukan peserta rapat, dengan mempertimbangkan semua rencana yang telah tersusun dapat teridentifikasinya struktur pengembangan destinasi wisata saat ini. Dengan struktur tersebut menurutnya dapat dilihat lebih lanjut bagaimana sebaiknya pengembangan kawasan pariwisata Borobudur.

Ia juga menyatakan bahwa BPIW mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mengawal penyusunan ITMP. Hasil dari penyusunan ITMP menurutnya menjadi milik semua pihak terutama yang berkaitan langsung dengan kawasan pariwisata tersebut. "Kita tidak menyentuh kawasan yang dikembangkan badan otorita, kita diluarnya," tutur Kuswardono.

Saat memberikan paparannya, Ketua Tim Konsultan, Jim Jessamine mengungkapkan laporan tersebut juga bertujuan untuk memaparkan perkembangan yang telah dicapai selama bulan pelaksanaan survei terhadap KSPN Borobudur. "Namun yang lebih penting adalah laporan ini dapat menjadi pendahuluan dan gambaran umum yang padu dalam proses penyusunan ITMP itu," ucap Jim.

Dikatakannya juga bahwa secara keseluruhan tujuan ITMP adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses dari infrastruktur dasar dan layanan pariwisata, memperkuat ekonomi lokal yang terkait dengan pariwisata, dan menarik investasi swasta di destinasi wisata terpilih di Indonesia.

Pada tahap awal tim ITMP melakukan beberapa pengamatan yang dapat memberikan informasi terhadap pendekatan yang akan dilakukan.



Pembahasan laporan pendahuluan ITMP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Magelang.

Sumber: Dok BPIW

Pengamatan meliputi akses dan infrastruktur, permintaan dan pertumbuhan, perilaku wisatawan, aspek-aspek sosial, dan pengaturan kelembagaan. Selain itu juga dilakukan pengamatan terkait perencanaan kota dan lingkungan.

George Soraya dari Bank Dunia menambahkan seluruh daerah yang berada di sekitar Borobudur dinilai penting untuk dikembangkan. Menurut George tantangan terbesar pada penyusunan ITMP ini adalah mengambil struktur yang paling penting dari sistem yang semuanya penting tersebut.

Namun yang jelas menurutnya penyusunan ITMP ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Kegiatan itu juga menampilkan beberapa pembicara seperti Kasubbid

Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Arif Wahyudhi. Pada kesempatan tersebut Arif menjelaskan bahwa Kawasan Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya merupakan salah satu dari empat destinasi pariwisata nasional di Provinsi

kawasan pariwisata Borobudur seperti pengembangan kawasan pariwisata tidak boleh mengancam keberadaan candi yang ada, harus melindungi karakter kawasan perdesaan, dan perbukitan Menoreh tidak dikembangkan secara masif sebab merupakan kawasan konservasi Candi Borobudur.

### Tantangan terbesar pada penyusunan ITMP ini adalah mengambil struktur yang paling penting dari sistem yang semuanya penting tersebut.

Jawa Tengah. Tiga destinasi pariwisata lainnya adalah Semarang-Karimun Jawa dan sekitarnya, Solo – Sangiran dan sekitarnya, serta Nusa Kambangan-Pangandaran dan sekitarnya.

la juga menjelaskan mengenai beberapa arahan pengembangan

Pengembangan Borobudur harus mempertimbangkan limitasi kawasan, menjaga bentang pandang, dan memperhatikan kawasan yang dilindungi. Kabid Sarana Prasarana Bappeda Provinsi DIY, Munarta mengakui bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara di daerahnya masih lambat. Untuk mengatasi masalah ini menurutnya perlu dilakukan *event* yang unik yang dapat menjadi daya tarik wisatawan dan berkelas internasional. **(Hen/infobpiw)**

# Pemerintah Jaring Masukan Pemangku Kepentingan Untuk Penyusunan ITMP Danau Toba

Dalam rangka menjaring masukan untuk penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) Danau Toba, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bersama Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), serta delapan pemerintah kabupaten di sekitar Danau Toba menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) ITMP untuk Danau Toba» di Toba Samosir, Sumut, Kamis (6/9).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Hj. R. Sabrina yang dibacakan Kepala Sub Bidang (Kasubdib) Kawasan Strategis dan Kerjasama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumut, M Yosi.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di sekitar Danau Toba, yakni Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Simalungun, Pemkab Dairi, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Pakpak Bharat, Pemkab Samosir, dan Pemkab Karo. Selain itu, hadir pula perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Pariwisata, serta Kementerian PUPR.

Sekda Sumut menyatakan, Danau Toba merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang merupakan salah satu prioritas untuk dikembangkan pemerintah pusat. Ia berharap, kegiatan FGD ITMP Danau

Toba dapat menghasilkan suatu rencana aksi yang kongkret, terpadu, dan menjadi pedoman untuk semua pihak dalam mengembangkan pariwisata Danau Toba, selain itu agar peningkatan kualitas sarana dan prasana di KSPN Danau Toba dapat segera terealisasi.

“Peningkatan kualitas sarana dan prasana di Danau Toba akan berdampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara,” ungkapnya. Ia menyatakan, tingginya jumlah kunjungan wisatawan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

---

**Danau Toba merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang merupakan salah satu prioritas untuk dikembangkan pemerintah pusat**

---

masyarakat di sekitar Danau Toba maupun perekonomian skala nasional.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW, Kuswardono yang diwakili oleh Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, Maulidya Indah Junica mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum untuk menjaring masukan dari seluruh *stakeholder* terhadap pengembangan Danau Toba, dalam rangka mendukung penyusunan ITMP Danau Toba yang ideal. “Saat ini merupakan waktu yang penting untuk

melihat kinerja Tim Penyusun. Apakah sudah pada jalur yang seharusnya atau sebaliknya. Besar harapan saya, Bapak dan Ibu perwakilan pemda dan kementerian/lembaga dapat memberikan masukannya,” terang Maulidya.

Ia mengatakan, saat ini telah terpilih Tim Penyusun yang melakukan penyusunan tiga ITMP, yakni Borobudur, Danau Toba dan Lombok. “Untuk *Kick Off* Kegiatan ITMP Danau Toba telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018 di Medan. Kegiatan FGD ini merupakan lanjutan Kegiatan *Kick Off* ITMP Danau Toba,” jelas Maulidya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penyusunan ITMP merupakan kegiatan yang mendapatkan dukungan Bank Dunia dalam rangka pengembangan pariwisata di Tanah Air. Pengembangan sektor pariwisata melalui *Indonesia Tourism Development Program* (ITDP) meliputi empat komponen. Antara lain komponen pertama meliputi, meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan.

Komponen kedua meliputi, meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar di kawasan wisata yang dipilih. “Komponen ketiga meliputi, mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata,” ujarnya. Adapun, komponen keempat meliputi meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang pariwisata.

Maulidya menekankan, untuk keberhasilan pengembangan pariwisata Danau Toba kata kuncinya adalah terpadu dan berkelanjutan.

Di tempat sama, anggota Tim Penyusun ITMP Danau Toba, Myra P. Gunawan menerangkan, untuk memulai sesuatu langkah besar harus ada, yakni berupa kesepakatan bersama dan keterpaduan. "Nah, untuk mendapatkan ITMP Danau Toba yang luar biasa juga, perlu adanya penyamaan persepsi dan keterpaduan," ujar Myra.

Ia menjelaskan, pariwisata pada dasarnya memiliki multifungsi. "Kita berharap pariwisata Danau Toba lebih berperan lebih, yakni berperan sebagai pariwisata yang mendorong pertumbuhan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan usaha, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah,-red), penciptaan nilai tambah SDA (Sumber Daya Alam,-red) maupun budaya," papar Myra.

Di tempat yang sama, Yosi menyampaikan, Pemprov Sumut maupun Pemkab di sekitar Danau Toba diharapkan mampu menyampaikan isu terkini terkait pengembangan kawasan Danau Toba. "Adapun implementasi dari hasil diskusi kali ini juga harus tertuang dalam program-program yang ada di kabupaten/provinsi sebagai dukungan pengembangan KSPN Danau Toba," tegas Yosi.

---

### Maulidya menekankan, untuk keberhasilan pengembangan pariwisata Danau Toba kata kuncinya adalah terpadu dan berkelanjutan.

---

Sementara itu, Senior *Private Sector Specialist Trade and Competitiveness*, Bank Dunia, Bertine Kamphuis mengatakan, KSPN Danau Toba mendapatkan dukungan pembiayaan dari Bank Dunia. "Dukungan itu ada dari APBN. Kemudian, saat ini Bank Dunia juga memberikan dukungan. Untuk itu

saya ingin menyakinkan Pemprov dan Pemkab di sekitar Danau Toba untuk dapat mengalokasi APBD-nya dalam rangka mengembangkan pariwisata Danau Toba," terangnya.

Ia juga berharap, perencanaan dan skema pembiayaan yang ada untuk Danau Toba tidak hanya diatas kertas, namun dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebelum mengakhiri kegiatan tersebut, para perwakilan Pemkab di sekitar Danau Toba berkomitmen menyampaikan utusan penanggungjawab untuk ditetapkan menjadi tim kelompok kerja penyusunan ITMP ini. Kemudian, berpartisipasi melakukan berbagi informasi dalam pengembangan Danau Toba, serta mengikuti pertemuan pembahasan selanjutnya. **(Ico/Ris/Pongki/Kandar/infoBPIW)**



Focus Group Discussion (FGD) ITMP untuk Danau Toba di Toba Samosir.

Sumber: Dok. BPIW

# Tahun 2019, BPIW Fokus Dukung Realisasi Program Prioritas Nasional

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 komitmen mendukung untuk mewujudkan prioritas nasional pemerintah yang bertema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas.”

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono mengatakan, prioritas nasional 2019 yakni, Pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

“Ketiga peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya.

Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air,” ungkap Hadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI mengenai Pembahasan Rincian Anggaran untuk Fungsi dan

**BPIW juga akan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagian timur Indonesia, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.**

Program masing-masing unit Eselon I Kementerian PUPR Tahun Anggaran (TA) 2019.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan, sesuai tugas dan fungsi BPIW pada 2019 akan melakukan perencanaan untuk pengembangan kawasan perbatasan

negara. “Khususnya untuk penataan di Kawasan PLBN (Pos Lintas Batas Negara,-red) termasuk kawasan permukiman dan tempat perputaran ekonomi di sekitar PLBN,” terangnya.

Kemudian ada juga perencanaan yang terkait mendukung lingkungan. Seperti isu mitigasi bencana, cagar budaya, kawasan konservasi dan lainnya. “Selain itu, ada juga perkotaan, sebagai upaya menciptakan sistem kota-kota yang ideal, *aerotropolis*, *smart living*,” terang Hadi.

Tak hanya itu, BPIW juga akan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagian timur Indonesia, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Lebih jauh, Hadi mengakui, pagu anggaran BPIW 2019 akan mencapai Rp 228 Miliar. “Dimana akan dialokasikan, antara lain untuk



Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI

Sumber: Dok. BPIW

kajian dan perencanaan di Kawasan Perbatasan Negara sebesar Rp 18,6 Miliar, Perubahan Iklim, Mitigasi, Bencana, Cagar Budaya dan Kawasan Konservasi sebesar Rp 9,8 Miliar, Isu Pembangunan Perkotaan Rp 25,5 Miliar.

Pengembangan Pusat Pertumbuhan Bagian Indonesia Timur Rp 10,5 Miliar, Ekonomi dan Logistik, Pengembangan Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri mencapai Rp 36,6 Miliar dan lainnya,” terang Hadi.

Hadi juga mengungkapkan, BPIW memiliki kebijakan untuk program 2019 antara lain, memastikan program-program *on going* akan tuntas, tidak ada lagi program *multiyears* baru kecuali bendungan, mengecek kembali manfaat dan tindak lanjut program.

“Kita harus memastikan *Masterplan*

dan *Development Plan* dapat diimplementasikan oleh setiap unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR. Kemudian

dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR dan jajaran, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan jajaran.

## BPIW memiliki kebijakan untuk program 2019 antara lain, memastikan program-program *on going* akan tuntas dan tidak ada lagi program *multiyears* baru kecuali bendungan

memperbanyak usulan program padat karya,” terang Hadi.

Pada sidang RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ibnu Munzir ini, dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR dan jajaran, Inspektur Jenderal (Irlen) Kementerian PUPR dan jajaran, Plt Kepala Badan Penelitian

Sebelum menutup sidang RDP, seluruh anggota Komisi V DPR memberikan pandangan dan sarannya. Ibnu Munzir mengatakan, Komisi V DPR dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke lapangan. “Setelah kunjungan ke lapangan, Komisi V akan memiliki dasar yang kuat, untuk melakukan mana yang perlu ditambah dan mana yang dapat dialihkan ke tempat lain,” terang Ibnu Munzir. **(ris/infoBPIW)**

# Kementerian PUPR Komitmen Tingkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman KSPN Prioritas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung percepatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Tanah Air. Salah satunya melalui kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kawasan destinasi wisata.

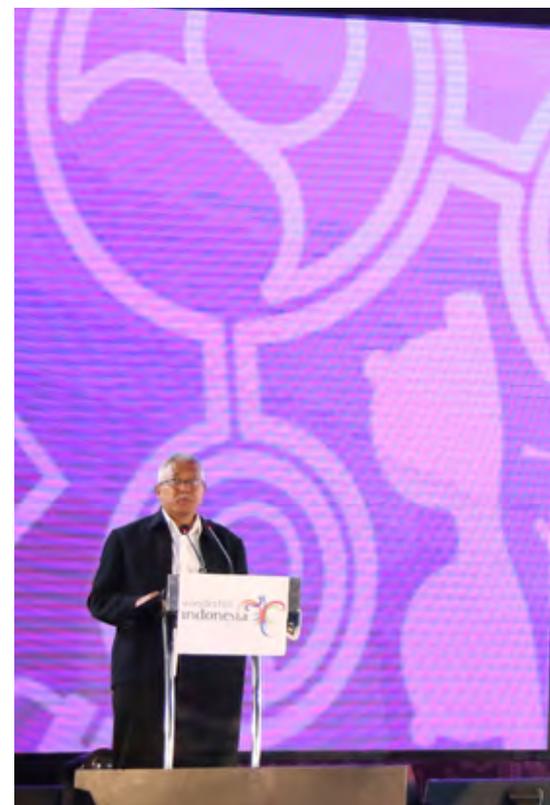
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Suchayono saat mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memaparkan, kegiatan ini mulai dari pemenuhan rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan baru.

“Ada juga penataan lingkungan perumahan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU),” ungkap Hadi saat paparan terkait “Dukungan Pengembangan Perumahan di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas” pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata 2018 yang mengambil tema “Investasi dan Pembiayaan Sektor Pariwisata” di Jakarta, Rabu, (26/9).

Kemudian, lanjut Hadi, ada juga kegiatan bantuan pembiayaan perumahan, serta dukungan lainnya seperti pengelolaan sumber air, pengaman pantai atau tepi sungai hingga pembangunan jalan untuk kemudahan akses menuju destinasi pariwisata.

Menurut Hadi dalam menciptakan keterpaduan perencanaan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Kementerian PUPR telah melakukan beberapa langkah, seperti membuat konsensus *stakeholders* di tingkat nasional,



Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata 2018

provinsi, dan kota/kabupaten baik unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kemudian menentukan objek dan tujuan prioritas dalam kawasan pariwisata strategis. “Melakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur terkait kawasan pariwisata, terutama bandara, jalan, air dan sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau, dan *integrated rest area*,” papar Hadi. Ada juga optimalisasi kapasitas kawasan

Kegiatan ini mulai dari pemenuhan rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan baru.

untuk turis asing dan domestik yang sesuai dengan perkiraan peningkatan jumlah turis. Kemudian, menyiapkan rencana pengembangan kawasan terpadu berupa *masterplan* untuk Kawasan Pariwisata Strategis. "Yang mencakup 3A. (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi,-red)," ujar Hadi.

Kementerian PUPR juga mengupayakan terciptanya keterpaduan antarsektor untuk KSPN, yakni menyiapkan kriteria kesiapan untuk investasi infrastruktur pariwisata.

usaha dan masyarakat, BUMN (Badan Usaha Milik Negara,-red), dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah,-red). Kemudian menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pariwisata serta destinasi pariwisata dan mendorong peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat di sektor kepariwisataan," terangnya.

Di tempat sama sebelumnya, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyatakan, sektor industri pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor andalan dalam menghasilkan devisa.

Arief juga mengatakan, untuk membangun 10 Bali Baru dan mengembangkan destinasi wisata yang ada Kementerian Pariwisata

---

## Sektor industri pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor andalan dalam menghasilkan devisa

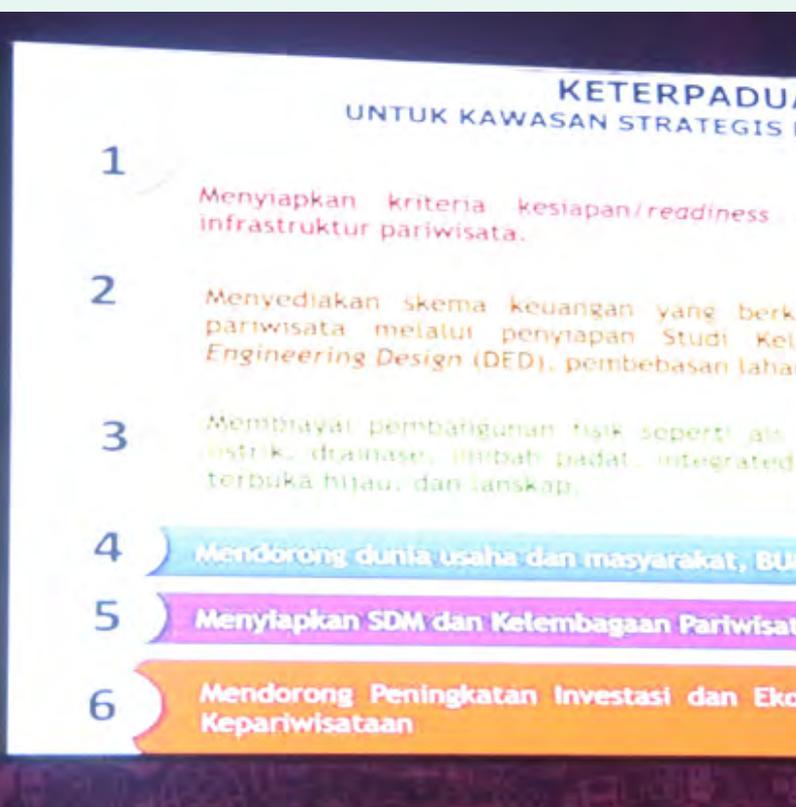
---

membutuhkan investasi sekitar Rp 500 Triliun hingga tahun 2024. "Kebutuhannya Rp 500 Triliun sampai 2024. Bukan buat 10 Bali Baru saja, tapi untuk semuanya," ungkap Arief.

Ada tiga kebutuhan pembiayaan yang diperlukan di sektor pariwisata. Pertama, untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, Kedua untuk kebutuhan pembiayaan usaha *homestay* serta Ketiga adalah kebutuhan pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pariwisata.

Arief ingin agar investasi pariwisata yang masuk bisa menetes dan dinikmati langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. "Ini sebagai bukti bahwa Pemerintah hadir untuk rakyat. Kementerian Pariwisata akan lebih ada gunanya, kalau semua skema investasi ini bermanfaat ke rakyat," tambah Arief.

Rakornas yang diikuti 600 peserta ini dihadiri unsur akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas pariwisata dari seluruh Indonesia. **(ris/infoBPIW)**



Sumber: Dok BPIW

"Kemudian menyediakan skema keuangan yang berkelanjutan untuk investasi pariwisata melalui penyusunan studi kelayakan, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), *Detail Engineering Design* (DED) serta pembebasan lahan," jelasnya.

Selain itu, membiayai pembangunan fisik seperti air bersih dan sanitasi, jalan, listrik, drainase, limbah padat, museum, ruang terbuka hijau, dan lanskap. "Termasuk mendorong dunia

"Mulai tahun 2015, pariwisata masuk ke dalam sektor unggulan dan tahun 2019 kembali menjadi sektor unggulan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKM)," ungkap Arief.

Kemenpar, ujar Arief, telah menjanjikan kepada pemerintah di tahun 2019 bahwa sektor pariwisata akan menghasilkan devisa terbesar dari seluruh sektor yaitu mencapai USD 20 miliar.

# BPIW Pastikan Penanganan Terpadu Infrastruktur Empat Sektor di 10+2 KSPN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memastikan penanganan terpadu infrastruktur empat sektor berjalan di 10+2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, Kementerian PUPR saat ini gencar melakukan penanganan infrastruktur terpadu empat sektor untuk 10+2 KSPN prioritas dalam rangka mewujudkan "Bali Baru", mulai dari sektor pengembangan konektivitas, sektor pembangunan infrastruktur permukiman, sektor pengelolaan sumber daya air serta penyediaan perumahan.

"Hal tersebut dilakukan untuk menunjang tercapainya target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019," ungkap Hadi saat menjadi nara sumber Diskusi Panel "Dukungan Peningkatan Infrastruktur Penujang Pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata

Prioritas" dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 3 Kepariwisata Indonesia di Jakarta, Rabu (26/9).

Ia menerangkan, ke 10+2 KSPN tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo - Tengger - Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai. Adapun dua

---

Kementerian PUPR saat ini gencar melakukan penanganan infrastruktur terpadu empat sektor untuk 10+2 KSPN prioritas dalam rangka mewujudkan "Bali Baru"

---

tambahannya Toraja dan Mandeh.

Hadi mencontohkan, untuk KSPN Danau Toba ada sejumlah penanganan seperti sektor konektivitas ada program pembangunan *overpass*, pembangunan jalan bebas hambatan "*Toll Road Development of Medan Kualanamu Project*", pelebaran jalan menuju standar di Bts. Kota Tarutung

Bts. Kab. Tapanuli Selatan, pelebaran jalan menuju standar di Barus - Bts. Kota Sibolga dan lainnya.

"Kemudian untuk sektor infrastruktur permukiman atau keciptakarya, yakni pembangunan Sanitasi Masyarakat (Sanimas) di Kab. Toba Samosir, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kab. Humbang Hasundutan, penataan kawasan wisata Tomok Tuktuk Siadang, Kab. Samosir dan lainnya," jelas Hadi.

Untuk sektor pengelolaan perairan antara lain, pembangunan bendung daerah irigasi Batang Toru di Kab. Tapanuli Utara, pembangunan *intake* dan jaringan pipa transmisi air baku Onan Ganjang di Kab. Humbang

Hasundutan, pembangunan *intake* dan jaringan pipa transmisi air baku Siborong-borong di Kab. Tapanuli Utara, pengendalian banjir sungai Aek Sibudong di Kab. Humbang Hasundutan dan lainnya.

"Adapun untuk sektor perumahan di Danau Toba, bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 6.000 unit," terangnya. Ia memastikan,



Diskusi Panel "Dukungan Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas"

Sumber: Dok BPIW

penanganan empat sektor tersebut berlaku di seluruh 10+2 KSPN.

Ia berharap, dukungan infrastruktur PUPR dalam mengembangkan KSPN tersebut mendapat dukungan juga dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta masyarakat luas.

Menurutnya, pengembangan KSPN kalau hanya mengandalkan pemerintah pusat akan berlangsung lebih lama. "Kalau terjadi sinergitas dukungan, pengembangan akan berhasil lebih cepat," yakinnya.

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Bekelanjutan, Kementerian Perhubungan, Ahmad M mengatakan, Kementerian Perhubungan memberikan dukungan dalam pengembangan pariwisata berupa pengembangan bandara, pelabuhan dan perkeretaapian. Ia mengatakan, sejumlah bandara di sekitar 10 KSPN saat ini terus

dilakukan pengembangan, seperti Bandara Silangit di dekat kawasan Danau Toba. "Kami juga menyiapkan pengembangan kereta api untuk Danau Toba-Medan," terang Ahmad.

Kemudian, Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan

Selain itu, lanjutnya, melakukan pembuatan konten promosi pariwisata. "Termasuk akan menjadi mediasi dengan *provider* telekomunikasi untuk dapat turut mempromosikan pariwisata nasional," terangnya. **(ris/infoBPIW)**

## Kementerian Perhubungan memberikan dukungan dalam pengembangan pariwisata berupa pengembangan bandara, pelabuhan dan perkeretaapian.

Informatika, Arifin Saleh Lubis mengatakan, dalam rangka mendukung percepatan pengembangan sektor pariwisata Kemkominfo telah melakukan sejumlah inovasi teknologi. "Salah satunya pembangunan jaringan internet di seluruh 10 KSPN," terangnya.

# BPIW Ekspos *Draft Masterplan* KPPN di Provinsi Sulawesi Tenggara

**B**adan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan melakukan Diskusi terkait ekspos *draft masterplan* Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Muna Barat dan KPPN Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada 25 - 26 September lalu.

Saat memberikan arahan dan pembukaan pada saat Rapat Pembahasan *Masterplan* KPPN Konawe Selatan, Kepala Pusat Pengembangan

kegiatan ini dilakukan untuk mencapai sasaran kegiatan, sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan, khususnya Kecamatan Tinanggea. Diskusi ini juga untuk mengakomodir aspirasi dari pemerintah daerah.

Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mencapai sasaran kegiatan, sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Konawe Selatan, khususnya Kecamatan Tinanggea. Diskusi ini juga untuk mengakomodir aspirasi dari pemerintah daerah.

Agusta menjelaskan, terdapat 11 aspek prioritas peran dari Kementerian/Lembaga yang akan mengisi program pengembangan kawasan perdesaan. Sementara yang menjadi koordinator program tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dari 11 aspek tersebut, Kementerian PUPR berperan pada empat aspek, yakni pertama pengembangan permukiman dan kesehatan. Kedua yakni pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi. Aspek ketiga yakni pembangunan/rehabilitasi sentra produksi, industri, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata.



Para narasumber pada FGD KPPN Konawe Selatan.

Aspek keempat yakni pembangunan/pemeliharaan sarana bisnis di kawasan ekonomi perdesaan.

Sedangkan dukungan Kementerian PUPR yang terlebih dahulu untuk pengembangan KPPN yaitu pemenuhan standar pelayanan minimum desa. Kemudian upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. "Saat ini penyusunan *masterplan* KPPN sudah pada tahap Diskusi di daerah. Hasil Diskusi ini akan disampaikan saat Rapat Koordinasi Internal Unit

Organisasi PUPR,” ucap Agusta. Agusta mengatakan, hasil *masterplan* ini akan digunakan di tahun 2020, karena hasil matriks program akan dibahas pada saat Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) 2019. Pra Konreg yang akan diadakan tahun depan itu merupakan konsolidasi dan sinkronisasi program Tahun Anggaran 2020.

Agusta berharap *masterplan* ini memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati yang berisi deliniasi wilayah dan komoditas unggulan dengan tujuan mempunyai legalitas yang

Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK, dan Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemen Desa PDTT).

Selain di Konawe Selatan, kegiatan yang sama digelar di Kabupaten Muna Barat dan dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat, Achmad Lamani. Saat itu Achmad menyatakan pelaksanaan dari dokumen *masterplan* ini merupakan tanggung jawab bersama. Ia menegaskan, salah satu tugas

Muna Barat ini dilakukan, guna menyampaikan *progress* penyusunan *masterplan* untuk kemudian didiskusikan dengan *stakeholder* terkait yang hadir.

“Dengan adanya berbagai masukan, maka diharapkan penyusunan *masterplan* dapat sesuai dengan

---

Hasil *masterplan* ini akan digunakan di tahun 2020, karena hasil matriks program akan dibahas pada saat Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) 2019. Pra Konreg yang akan diadakan tahun depan itu merupakan konsolidasi dan sinkronisasi program Tahun Anggaran 2020.

---

kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan di kabupaten ini, khususnya di Kecamatan Maginti dan Tiworo Selatan,” ungkapnya saat memberikan arahan dan pembukaan FGD itu. Kegiatan ini dihadiri beberapa kalangan seperti Bappeda Kab. Muna Barat, perwakilan dari Kemen Desa PDTT, dan perwakilan Kementerian Kelautan Perikanan. **(Shahnaz/Shindie)**



Sumber: Dok BPIW

kuat. “Operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah kami bangun, harus jadi perhatian pemerintah daerah. Agar apa yang kita bangun, dapat berdampak pada tumbuhnya perekonomian masyarakat,” ungkap Agusta.

Beberapa narasumber yang hadir di kegiatan di Kabupaten Konawe Selatan ini adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Bappeda Kabupaten Konawe Selatan, Asisten

Pemerintah Kabupaten Muna Barat yakni memberikan kepastian terkait ketersediaan lahan dan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED). “Untuk penyusunan SK Deliniasi Kawasan, saya sudah mendapatkan info dari Kepala Bappeda bahwa *draft* sudah selesai dan akan segera diserahkan ke Bapak Bupati untuk ditandatangani,” tuturnya.

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan menyatakan kegiatan Diskusi KPPN

# Dukung Pengembangan Pariwisata, Kementerian PUPR Ikuti *Launching Homestay dan Tourist Guide*

Seremoni pembukaan acara

Sumber: Dok BPIW

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hadi Suahyono mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), M. Basuki Hadimuljono turut mengikuti acara "*Launching Pilot Project Pengembangan Kewirausahaan Sektor Pariwisata*" berupa *Homestay dan Tourist Guide* di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (20/9).

Pelaksanaan *launching* tersebut ditandai dengan pemukulan gonggong oleh para pimpinan kementerian/ lembaga terkait pengembangan pariwisata, yakni Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Rosdiana V Sipayung, Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Asrorun Niam Soleh.

Selain itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Kawasan Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes dan PDTT) Harlina, Direktur Edukasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Poppy Savitri, Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, serta Direktur

Utama Badan Otorita Danau Toba, Arie Prasetyo. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan dari masing-masing pejabat tersebut.

Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya mewakili Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan kewirausahaan *homestay* dan *tourist guide* di Kabupaten Humbang Hasundutan dan wilayah lain sekitar Dana Toba.

Menurutnya, *homestay* dan *tourist guide* merupakan kewirausahaan yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, agar pertumbuhan perekonomian masyarakat dapat lebih baik. Arief menerangkan, Danau Toba saat ini dalam proses mendapatkan sertifikasi Unesco dalam bidang geologi, biologi, dan kebudayaan.

Di sela-sela acara, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono mengatakan kabupaten tersebut merupakan satu dari delapan kabupaten yang masuk program *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP). "Program ITMP tersebut terdapat pengembangan pariwisata secara terintegrasi yang dananya *loan* dari Bank Dunia," terangnya. Kementerian PUPR dalam pengembangan KSPN Danau Toba memberikan dukungan infrastruktur pengembangan konektivitas, pengembangan infrastruktur permukiman,

pengelolaan sumber daya air serta penyediaan perumahan.

Pada tahun 2018, lanjut Hadi, program untuk konektivitas ada program seperti pembangunan jembatan gantung di Simonis-monis Aek Sibatu-batu. Direktorat Penyediaan Perumahan ada program rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun mahasiswa Akademi Kebidanan Kesehatan Baru Dolok Sanggul dan lainnya. Untuk pengelolaan sumber daya air ada pengendalian banjir Sungai Aek Sibudong.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah pusat yang telah menetapkan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) nomor satu untuk dikembangkan.

Di tempat sama, Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi menyatakan dukungan dari Pemerintah Pusat harus diiringi dengan dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat secara optimal, sehingga semakin banyak wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik mengunjungi daerah-daerah sekitar Danau Toba termasuk Kabupaten Humbang Hasundutan. **(ris/hen/InfoBPIW)**



# Kunjungi Posko CPNS, Kepala BPIW Jelaskan Program Jangka Menengah dan Panjang Untuk Lombok

Pengarahan kepada CPNS di Lombok

Sumber: Dok BPIW

**K**epala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Suahyono melakukan kunjungan ke Posko Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di areal pengungsian di Pulau Lombok, Jumat (14/9). Ia berkunjung ke Posko CPNS di Gunung Sari di Kabupaten Lombok Barat dan di Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Dalam kunjungan tersebut Hadi menjelaskan bahwa selain menangani pembangunan infrastruktur pasca gempa, Kementerian PUPR perlu membuat program untuk jangka menengah dan panjang seluruh kawasan yang terintegrasi dengan penyusunan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika atau Lombok.

"Jadi kita tidak hanya memikirkan jangka pendek penanganan Lombok pasca gempa, tapi juga jangka menengah dan panjang. Apalagi Lombok memiliki potensi yang perlu dikembangkan, salah satunya wisata," ungkap Hadi.

Dikatakannya BPIW mengirimkan tim untuk melakukan survei ke beberapa tempat di utara Lombok dan kawasan Sembalun di Lombok Timur, untuk melihat kondisi kawasan yang rusak dan melihat potensi wisata yang perlu

dikembangkan, seperti Pantai Pink di Lombok Timur.

Saat itu ia mengunjungi lokasi CPNS yang sedang berada di lapangan dan melakukan dialog. Hadi juga meminta agar para CPNS menjaga kesehatan dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Didepan para CPNS, Hadi memastikan bahwa Kementerian PUPR selalu memperhatikan mereka.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari penugasan dari Bapak Menteri, di mana secara berkala para Pejabat Tinggi Pratama hadir di Lombok ini. Selain memberikan dukungan, kita harus memastikan semua yang dilakukan berjalan dengan baik," tutur Hadi.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan penugasan kepada para CPNS di Lombok, selain pendampingan kepada masyarakat dalam menerapkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang menggunakan teknologi rumah tahan gempa, juga membantu melakukan pendataan areal yang terkena gempa, sebagai bahan perencanaan ideal lingkungan permukiman.

Menurut Hadi BPIW berperan pada bagian perencanaan penanganan pasca gempa secara terpadu dengan ITMP agar pembangunan yang dilaksanakan menjadi sinergi. Dalam kaitan itu

BPIW akan merumuskan penataan ideal lingkungan permukiman dan infrastruktur sektor PUPR seperti apa yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi pasca gempa.

Semua unit organisasi atau unor di Kementerian PUPR menurutnya tengah bergotong royong baik dalam hal fisik maupun non fisik untuk memulihkan kondisi infrastruktur di daerah tersebut. Hadi berharap dengan dibangunnya kembali infrastruktur yang rusak, dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat.

Turut hadir mendampingi Kepala BPIW tersebut adalah Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana yang juga merupakan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan, Gani Ghazaly dan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga. **(Hen/ajeng/infobpiw)**

# BPIW Siapkan Rencana Khusus Pengembangan Cagar Budaya



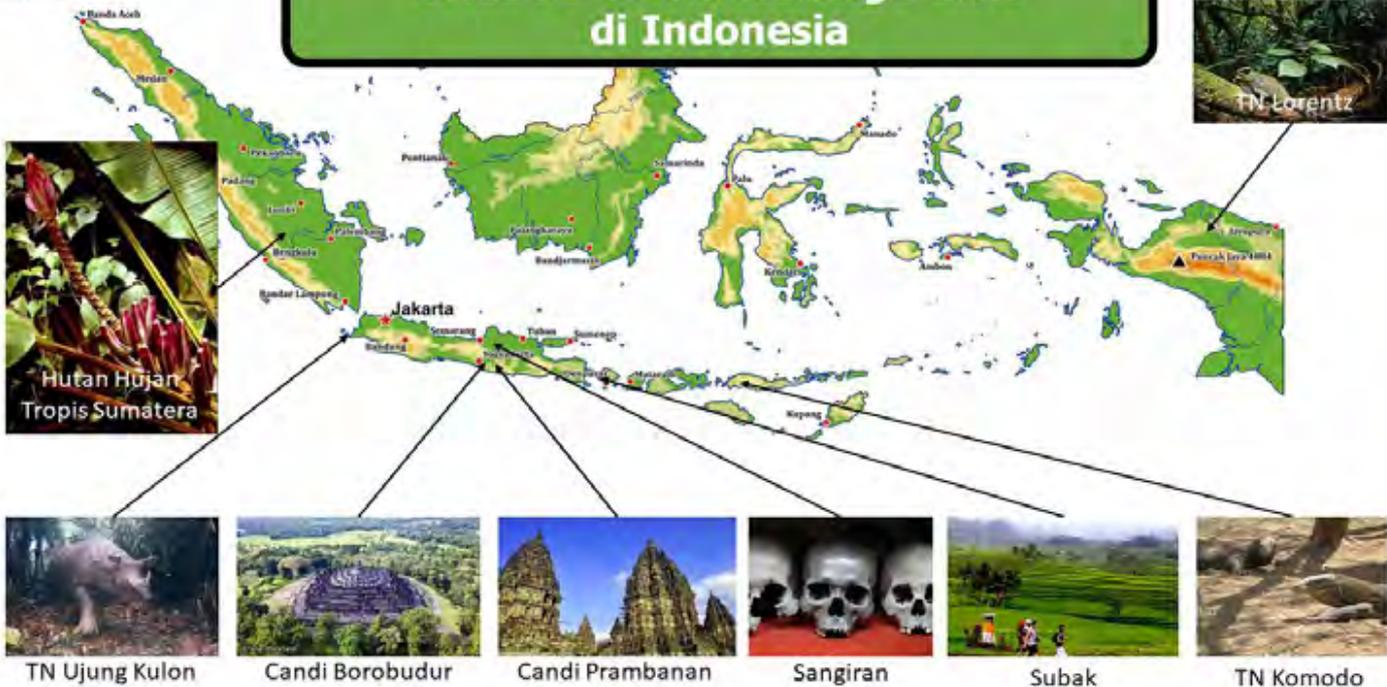
Kawasan desa wisata di Lombok, NTB

Sumber: Dok. BPIW

**P**engembangan infrastruktur di Indonesia terus didorong semakin memperhatikan keseimbangan terhadap daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Tak lain, hal tersebut dilakukan dalam mewujudkan pengembangan kawasan yang berkonsep pada pembangunan berkelanjutan. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan terobosan dengan melakukan rapat koordinasi agar dapat mewujudkan pengembangan infrastruktur yang mendukung pelestarian.



# UNESCO World Heritage Lists di Indonesia



Kementerian PUPR melalui BPIW terus melakukan dukungan percepatan pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan untuk kawasan cagar budaya dan alam di Tanah Air.

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Bobby Prabowo mengatakan, perencanaan pengembangan infrastruktur perlu disesuaikan dengan tema kawasan, agar hasil dari pembangunan dapat sejalan dengan tujuan dan memiliki dampak positif bagi lingkungan.

“Jangan sampai pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan malah kontraproduktif atau menurunkan mutu lingkungan,” ungkap Bobby saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Awal Dukungan Penguatan Keterpaduan Infrastruktur PUPR untuk Pelestarian Cagar Budaya dan Alam Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur pada kawasan cagar alam dan cagar budaya adalah penyelarasan

pembangunan infrastruktur dengan pelestarian lingkungan.

Artinya, ia mengungkapkan, perlu dicari solusi agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat membangkitkan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat. “Kemudian cagar budaya dan cagar alam yang ada tetap terjaga kelestariannya,” terang Bobby.

## Perencanaan pengembangan infrastuktur perlu disesuaikan dengan tema kawasan, agar hasil dari pembangunan dapat sejalan dengan tujuan

ia yakin, kegiatan ini dapat memunculkan rumusan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pelestarian cadar budaya dan alam.

“Baik standarisasi desain, material hingga jasa konstruksi pelaksana pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan cagar budaya dan alam. Hal itu dilengkapi lagi

dengan analisisnya mendalam,” ungkap Bobby. Hal senada diterangkan, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur II, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian, Riska Rahmadia.

ia menerangkan, dalam kegiatan ini pihaknya berupaya menjangir masukan-masukan dari para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan perencanaan pengembangan infrastuktur di kawasan cagar budaya dan cagar alam.

“Termasuk menggali nilai-nilai kekhususan pada kawasan tertentu, seperti *geopark* dan kawasan lainnya. Selain itu, penetapan delineasi dan zonasi kawasan dalam bentuk peta,” harapnya.

Riska menceritakan, Kementerian PUPR melalui Bidang Cipta Karya telah mendapat tugas untuk melakukan penanganan terhadap 7 (tujuh) Taman Nasional. “Dalam penanganan tersebut tentu perlu perencanaan infrastuktur yang tepat,” jelasnya.

Rakor tersebut dihadiri perwakilan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Jejaring



Rapat Koordinasi untuk Pelestarian Cagar Budaya dan Alam

Sumber: Dok BPIW

Inovasi SDA Maritim, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, perwakilan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, perwakilan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, perwakilan Bidang Wisata Petualangan, Kementerian Pariwisata, perwakilan Bidang Sejarah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perwakilan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, perwakilan Direktorat Sumber Daya Energi dan Pertambangan BAPPENAS serta perwakilan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi Kementerian PUPR, Fx. Hermawan Kusumartono mengatakan, pelestarian cagar budaya, dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

“UNESCO juga merumuskannya dalam konsep *Natural Heritage Landscape*, di mana Cagar Budaya merupakan satu kesatuan dengan bentang alam dan bentang budaya,” terangnya.

Hal ini berarti, lanjutnya, pelestarian Cagar Budaya tidak dapat lagi dilepaskan dari pelestarian lingkungan atau alam.

Menurutnya, Kebijakan dan strategi infrastruktur PUPR harus mendukung konsep *“Responsible Tourism”*; “Agar yang dilakukan Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mengelola dan memastikan pemanfaatannya tepat sasaran,” jelasnya.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memaparkan kawasan cagar budaya dapat memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang. Sehingga, peninggalan tersebut memiliki sejarah bagi kehidupan manusia.

“Kemudian memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya. Dimana lanskap budaya hasil bentuk manusia yang usianya lebih dari 50 tahun,” terangnya.

Ia menjelaskan, saat ini memang ada masalah yang dihadapi dalam pengembangan kota dengan pelestarian cagar budaya. Yakni, pengembangan kota sering tidak memperhatikan aspek kekhunian.

“Kemudian cagar budaya masih kerap dianggap menghambat pengembangan pembangunan kota, termasuk tingkat perubahan lingkungan dan bangunan sangat tinggi,” lanjutnya.

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan tantangan yang bisa dicari cara penyelesaiannya, yakni dengan menyelaraskan pembangunan kota dengan pelestarian cagar budaya.

“Perlu dilakukan inventarisasi, identifikasi nilai dan potensi cagar budaya, sehingga akan dapat meningkatkan nilai cagar budaya sekaligus kawasan sekitarnya,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan kawasan budaya yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. “Dengan tetap mempertahankan kelestariannya untuk kepentingan, agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata,” terangnya. **(Redaksi)**

Pelestarian cagar budaya, dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana.

# Peran Strategi Pembangunan Internasional dalam Menentukan Kebijakan Pengembangan Wilayah: Studi Kasus Hokkaido

Juha Saunavaara

*Hokkaido University, Arctic Research Center, Sapporo, Japan  
Urban Izziv, Volume 28, No. 2, 2017*

Akhir-akhir ini banyak pemerintah negara dan organisasi internasional mencari cara untuk dapat mengurangi kesenjangan dan merevitalisasi daerah-daerah yang tertinggal. Langkah ini ditempuh untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan kesenjangan regional kronis yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan nasional. Strategi-strategi pengembangan yang tercipta dari beberapa tempat ini, kemudian menyebar dan diadopsi di tempat yang lain dengan metode transfer kebijakan.

Penelitian mengenai transfer kebijakan ini sudah muncul sejak tahun 90-an dan terus meningkat. Keingintahuan ini bukan hal baru dan merupakan fenomena yang meluas secara geografis. Artinya terjadi di banyak negara.

Hokkaido tergolong sebuah wilayah *perifer*, yang jauh dari pusat kota. Karena posisinya sebagai pulau yang terpisah di bagian timur laut Jepang. Namun setelah 150 tahun berproses, Hokkaido (yang awalnya bernama Ezochi) kini telah menjadi salah satu bagian dari Jepang Modern. Proses yang lama ini disebut-sebut dalam beberapa istilah mulai dari kolonisasi, subordinasi, peradaban, modernisasi, hingga revitalisasi, tergantung konteks yang digunakan. Artikel ilmiah ini membahas kebijakan pembangunan wilayah yang diterapkan di Hokkaido selama era pascaperang dengan dua tujuan utama.

Tujuan pertama adalah diharapkan artikel ini berkontribusi dalam studi fenomena transfer kebijakan melalui kasus yang

fokus ke *agency* manusia dan entitas geografis yang relatif kurang dikenal, terutama bagi mereka yang tidak membaca bahasa Jepang.

Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk menambah kumpulan penelitian yang berusaha menjelaskan isi dan proses dari kebijakan pembangunan daerah pascaperang Hokkaido yang menjabarkan peran strategi pembangunan internasional.

Penelitian ini menganalisa peran 3 strategi pembangunan internasional dalam pembangunan di Hokkaido. Ketiga strategi tersebut adalah *The Tennessee Valley Authority (TVA) Model*, *The Growth Pole Model*, dan *Industrial Cluster Theory*.

---

Penelitian ini menganalisa peran 3 strategi pembangunan internasional dalam pembangunan di Hokkaido : *The Tennessee Valley Authority (TVA) Model*, *The Growth Pole Model*, dan *Industrial Cluster Theory*.

---

## **TVA: Debat Publik tentang Model Ideal Pembangunan Wilayah**

Konsep TVA awalnya ditujukan untuk membawa isu penting *Tennessee Valley* dalam bidang energi, penatagunaan lingkungan, dan pembangunan ekonomi.

TVA juga memperkenalkan partisipasi *grass-root* dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. TVA sering diperbincangkan dalam diskusi-diskusi terkait pembangunan Hokkaido pada akhir 1940 dan awal 1950. Strategi TVA pernah menjadi inspirasi kunci untuk Undang-undang tentang Pembangunan Tanah Nasional yang Komprehensif tahun 1950 yang meletakkan dasar untuk pengembangan pascaperang dan menekankan proyek hidrologi skala besar serta pekerjaan umum lainnya.



Namun di luar perkiraan, filosofi TVA ini ditolak oleh bagian pemerintah Hokkaido saat itu ketika terjadi negosiasi pascaperang Hokkaido. Agen-agen yang berbasis di Hokkaido dengan antusias menyebut TVA sebagai model yang dapat digunakan ketika merekonstruksi sistem pengembangan Hokkaido. Namun demikian, mereka menghadapi pertentangan dari penguasa dan pemerintah pusat saat itu. Dalam beberapa hal pemerintah Hokkaido menerima konsep-konsep TVA, namun tidak bisa menerima jika TVA menjadi model pembangunan di Hokkaido.

### Mengadopsi *Growth Pole Model* sebagai Bagian dari Kebijakan Pembangunan Nasional yang Komprehensif

Teori Kutub Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Pole Theory*) Teori ini dipelopori oleh Francois Perroux. Perroux mengindikasikan bahwa pembangunan harus didasari oleh suatu konsentrasi (aglomerasi) tertentu bagi kegiatan ekonomi dalam suatu ruang yang abstrak. Meskipun Perroux awalnya membantah bahwa ruang ekonomi abstrak bisa sesuai dengan wilayah geografis seperti kota atau daerah, ide-idenya kemudian dikembangkan lebih lanjut dan ditempatkan di ruang geografis.

Jepang adalah salah satu negara yang mengadopsi Teori Kutub Pertumbuhan Ekonomi sebagai panduan perencanaan regional pada 1960 dan 1970-an. Rencana Pembangunan Nasional yang disetujui oleh kabinet Jepang pada tanggal 5 Oktober 1962 adalah instrumen utama yang menggabungkan Model Kutub Pertumbuhan ke dalam skema pembangunan regional Jepang. Rencana tersebut menekankan pengembangan daerah-daerah tertentu yang dipilih yang dianggap sebagai mesin potensial pertumbuhan ekonomi.

Bahkan dasar hukum pun sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menerapkan kebijakan menggunakan model ini. Kebijakan ini pun berdampak pada proses pembangunan wilayah di Hokkaido. Wilayah Hokkaido Tengah yang terdiri dari daerah Sapporo, ditetapkan sebagai salah satu kota industri baru pada bulan April 1964; jumlah total kota-kota meningkat menjadi lima belas pada tahun 1966 termasuk pembangunan Zona Industri Pesisir Tomakomai.

### Memperkenalkan *Industrial Cluster Theory* berdasarkan permintaan dari bawah

Rencana Pembangunan Komprehensif Hokkaido Keempat (1978–1987) memperkenalkan pendekatan baru dan memberi penekanan pada lingkungan alam, kesejahteraan manusia dan partisipasi lokal. Hal itu terjadi karena ada kekhawatiran besar tentang pendanaan proyek pembangunan di masa depan dan ketika Hokkaido menghadapi masalah serius atau kebangkrutan (misalnya, Hokkaido Takushoku Ginko, bank terbesar di Hokkaido, runtuh pada musim gugur 1997), muncul slogan baru, klaster industri. Ada berbagai interpretasi dari istilah *klaster*. Secara umum, klaster mengacu pada konsentrasi industri dan perusahaan di wilayah geografis tertentu dan keterkaitannya.

Metode klaster ini telah digambarkan sebagai kontribusi *bottom-up* yang luar biasa terhadap pembangunan Hokkaido. Selain instrumen kebijakan nasional, munculnya teori ini sangat tergantung pada kegiatan kelompok kepentingan lokal dan individu yang berpengaruh. Berikut ini adalah gambaran institusi yang mendukung terciptanya klaster industri di Hokkaido:

**Table 1:** Major institutions and instruments supporting the creation of industrial clusters in Hokkaido.

June 1986	Hokkaido Regional Technology Advancement Centre (HOKTAC)
July 1993	Hokkaido Foundation for the Promotion of Science, Industry and Technology
Feb. 1996	Regional Industry Policy Research Group (founded in February 1995), renamed Hokkaido Industrial Cluster Creation Research Group
Aug. 1996	Toward Self-Sustaining Hokkaido Economy Vision by Hokkaido Industrial Cluster Creation Research Group
1996	High-Technology Research Centre established within Hokkaido University
May 1997	Toward the Creation of Hokkaido Industrial Clusters (midterm report)
Dec. 1997	Hokkaido Industrial Cluster Creation Action Plan
Apr. 1998	Cluster Project Department established within HOKTAC
Feb. 2000	Hokkaido Industry-Academia-Government Collaboration Centre established within Hokkaido University (KORABO Hokkaido)
July 2001	HOKTAC and the Hokkaido Foundation for the Promotion of Science, Industry and Technology merge into the Northern Advancement Centre for Science and Technology (NOASTEC)
2002	Establishment of Creative Research Initiative Sousei (CRIS)
Apr. 2003	Hokkaido University Research and Business Park Promotion Committee
Apr. 2007	Hokkaido University Research and Business Park Promotion Committee secretariat switched from the Hokkaido Economic Federation to NOASTEC

Source: Ōhashi (2000), Internet 1, Internet 2.

Dan berikut ini adalah penggabungan Strategi Pembangunan Internasional kedalam Kebijakan pengembangan wilayah di Hokkaido:

**Table 2:** Incorporation of international development strategies into Hokkaido's development policy.

Development strategy (timing)	TVA (late 1940s and early 1950s)	Growth Poles (1960s and 1970s)	Clusters (1990s and early 2000s)
Source or origin of inspiration	United States, TVA, David E. Lilienthal	Comprehensive National Development Plan	Oulu region, Nordic countries
National context	Allied occupation, post-war reconstruction	Beginning of comprehensive national planning	Shift from the technopolis policy, burst of the bubble economy
Hokkaido context	Reconstruction, First Hokkaido Plan	Second and Third Hokkaido Comprehensive Plans	Concern about funding development projects, bankruptcies
Local promoters of new development strategies	Governor Toshifumi Tanaka (left-wing of the political spectrum)	-	Kazuo Toda (HEPCO, Hokkaido Economic Federation)
Short-term outcome	Public recognition, not a part of the First Comprehensive Hokkaido Development Plan but resembling infrastructure projects	Growth Poles incorporated into the Hokkaido Comprehensive Development Plans	Organisational development, clusters become part of the Sixth Comprehensive Hokkaido Development Plan

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan banyaknya pihak yang terlibat dalam proses transfer kebijakan. Melalui tiga kasus yang mewakili dekade pascaperang yang berbeda, dapat dilihat bahwa tidak hanya politisi dan birokrat (di tingkat nasional dan regional) tetapi juga perwakilan dari berbagai kelompok kepentingan dan akademisi telah berpartisipasi dalam proses ini.

Penelitian ini juga memberikan bukti empiris yang membuktikan bahwa transfer kebijakan tidak berbeda dari proses pembuatan kebijakan lainnya dan sering didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau salah. Literatur teoritis

juga menekankan bahwa transfer kebijakan bukanlah suatu proses yang dapat diadopsi semua atau tidak sama sekali. Adopsi transfer kebijakan bervariasi, mulai dari meniru sampai kepada memadukan kebijakan atau inspirasi yang berbeda, di mana kebijakan dapat menginspirasi perubahan tanpa mengikuti isi kebijakan asli. **(Mutri)**

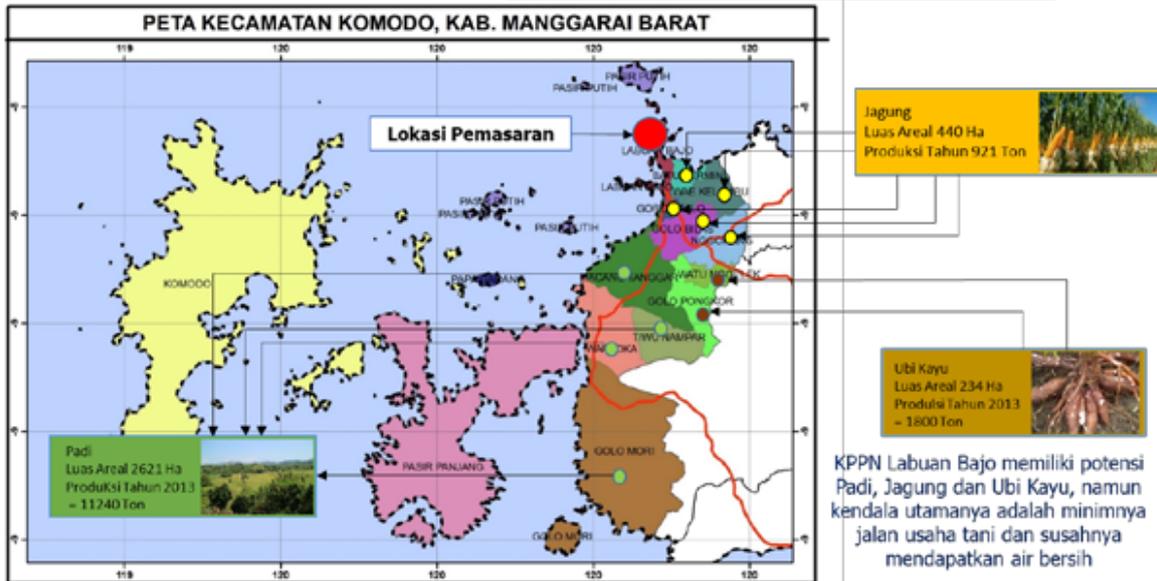
\*) Untuk mendapatkan softcopy artikel ilmiah ini, dapat menghubungi redaksi.



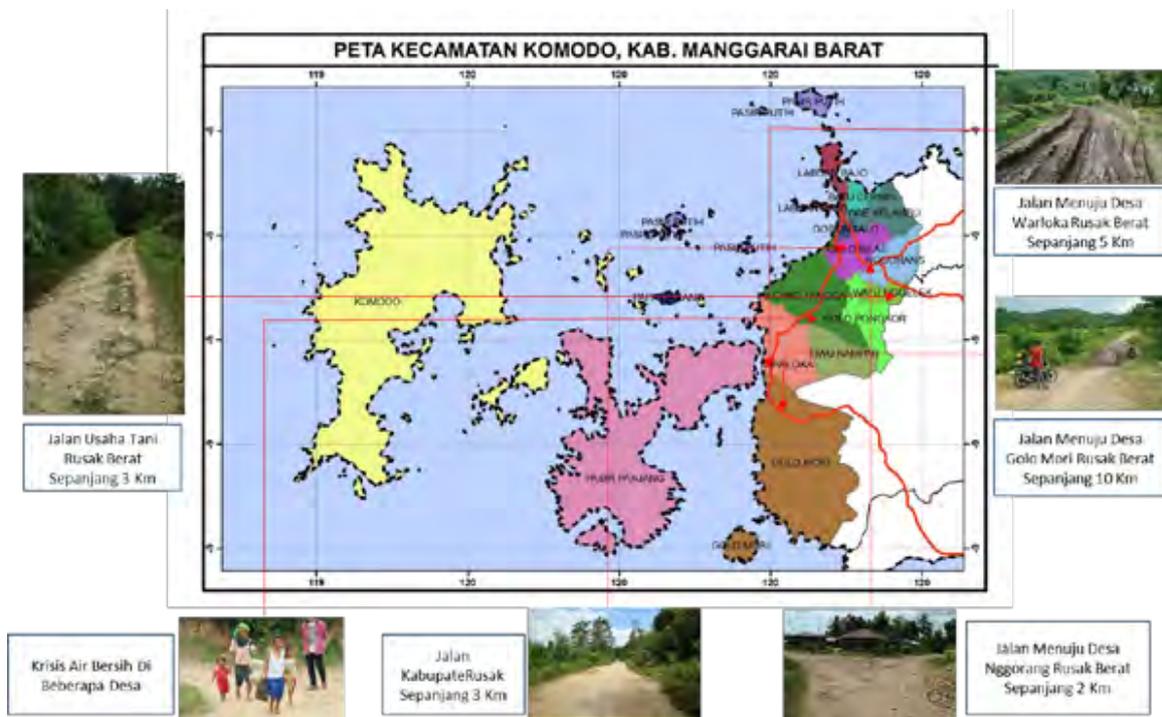
Penyusunan *Masterplan* dan Pra DED Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Labuan Bajo ini bertujuan untuk merencanakan pengembangan kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) yang berbasis keberlanjutan, efisiensi, efektif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan dalam

mengoptimalkan distribusi barang dari desa ke kota. Dengan tersusunnya *masterplan* dan Pra-DED serta program pengembangan infrastruktur PUPR dan infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR) ini diharapkan dapat terciptanya keterpaduan antarsektor, antarwilayah, dan antartingkat pemerintahan

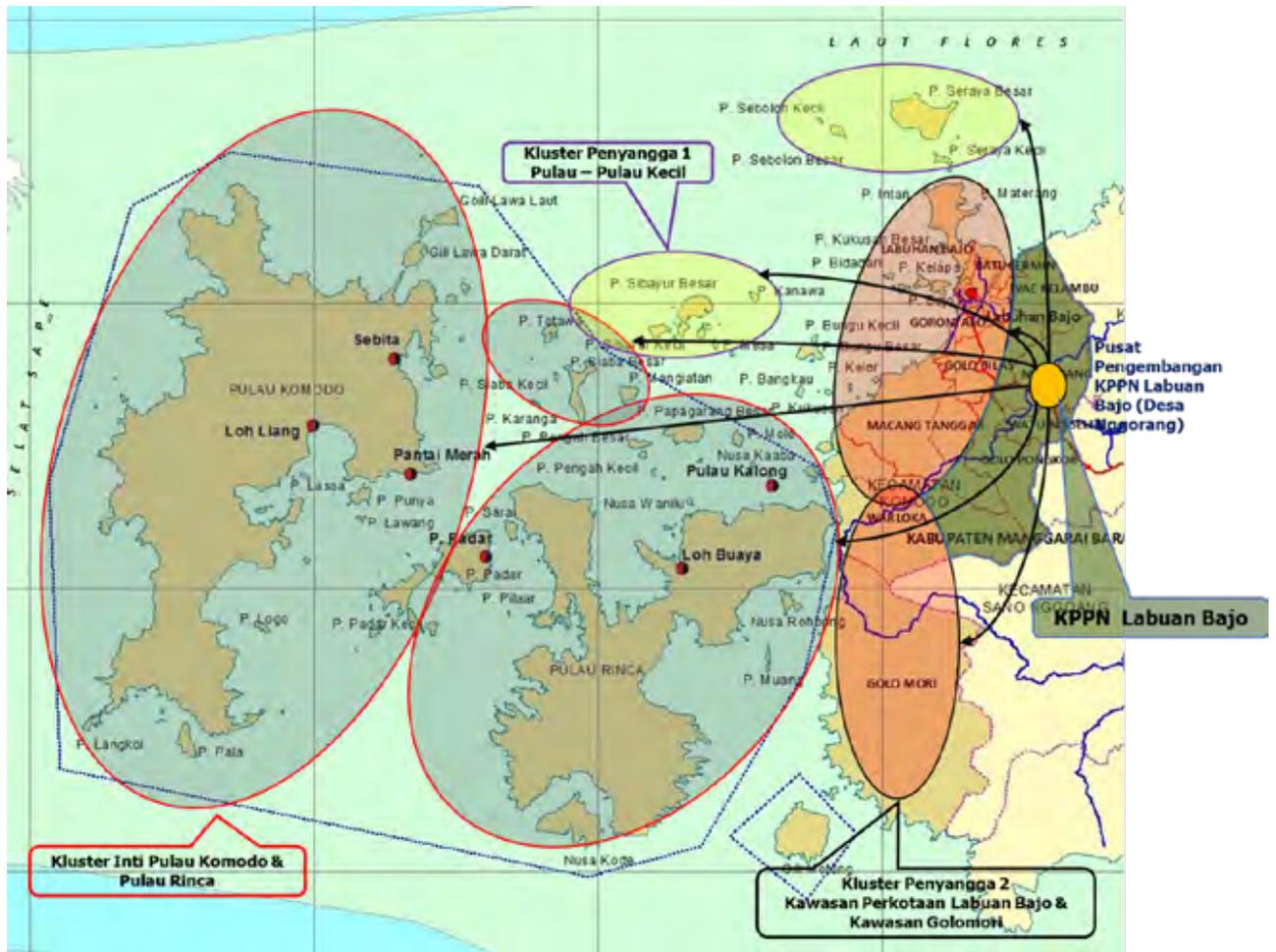
berdasarkan kebutuhan jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (3-5 tahunan), dan jangka pendek (1-3 tahun) dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional.



Gambar 2. Pemetaan Potensi KPPN Labuan Bajo



Gambar 3. Pemetaan Permasalahan KPPN Labuan Bajo



Gambar 4. Zona pengembangan Kawasan

Pengembangan kawasan dibagi menjadi 2 zona :

Zona Inti : Komodo dan Pasir Panjang

Zona Penyangga : Macan Tanggar, Warloka, Golo Mori, Seraya Meranu, Pasir Putih, Papa Garang, Labuan Bajo, Gorontalo, Batu Cermin dan Wae Kelambu  
 KPPN : Nggorang, Watungelek, Golopongkor, Tiwu Nampar, Golobilas, Companglonggo, dan Pantar



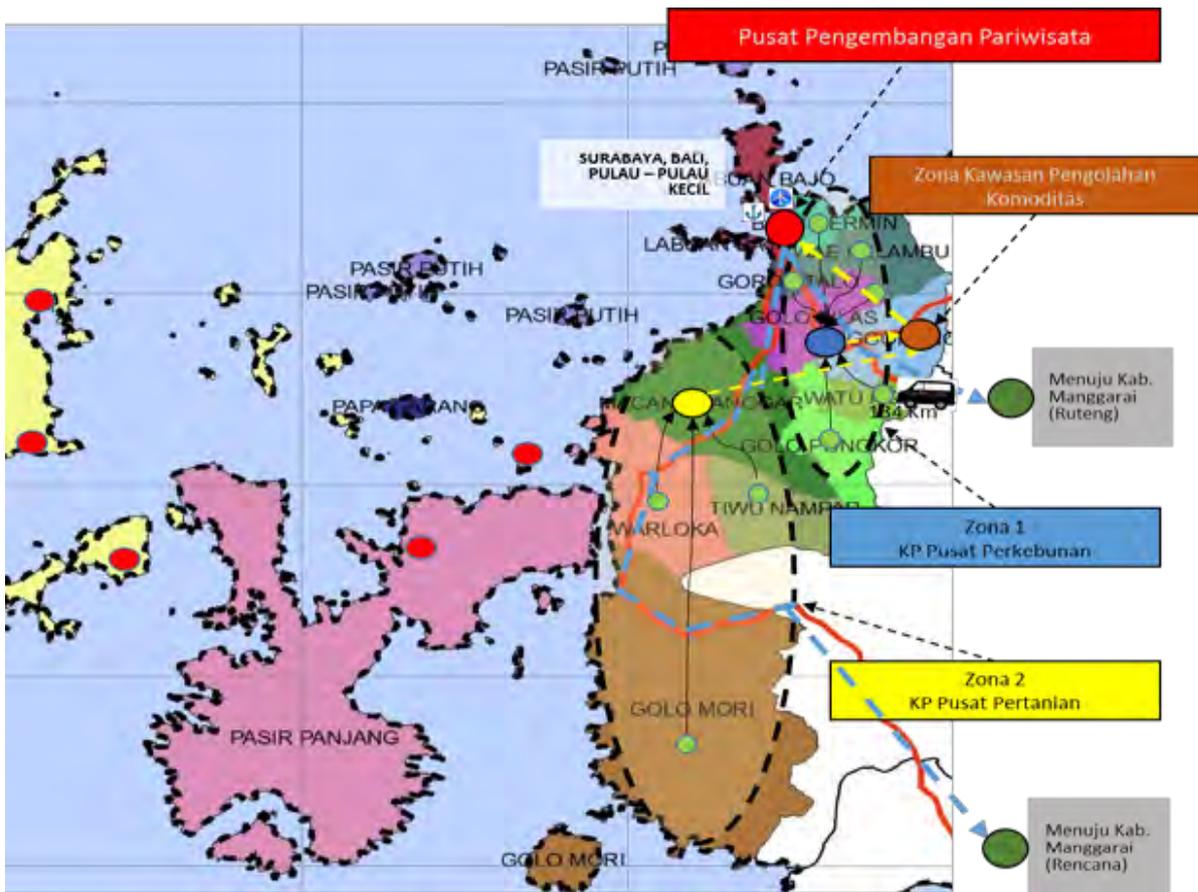
# KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN

KPPN LABUAN BAJO TAHUN 2016

KPPN Labuan Bajo diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan sektor kelautan perikanan dan pertanian bagi KSPN Komodo. Perwujudan arahan pengembangan tersebut dilakukan dengan membagi kawasan menjadi 2 (dua) kluster, yaitu kluster 1 zona pengembangan perkebunan dan cluster 2 zona pengembangan pertanian. Sentra produksi dan

pengolahan hasil pertanian terletak di Desa Nggorang, sementara sentra pengumpulan hasil perkebunan berada di Desa Golo Bilas. Sentra produksi skala desa tersebar di seluruh desa pada KPPN Labuan Bajo. kluster I diarahkan memiliki 1 (satu) sentra pengolah sebagai upaya efisiensi jarak pelayanan. Sementara kluster II diarahkan memiliki 1 (satu) sentra

pengumpulan hasil pertanian. Alur distribusi barang diarahkan beranjak dari sentra produksi diolah pada sentra pengolah kemudian didistribusikan kepada sentra pemasar yang terpusat pada sentra perdagangan. Adapun skema pengembangan kawasan dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 5. Konsep Pengembangan KPPN Labuan Bajo

- Simpul Backbone (Kelurahan Labuan Bajo)
- Pusat Pengolahan Hasil Pertanian (Desa Nggorang)
- Kawasan Sentra Pengumpul Hasil Perkebunan (Desa Golo Bilas)
- Kawasan Sentra Pengumpul Hasil Pertanian (Desa Macan Tanggar)
- Sentra Produksi (Skala Desa)
- Aset Wisata

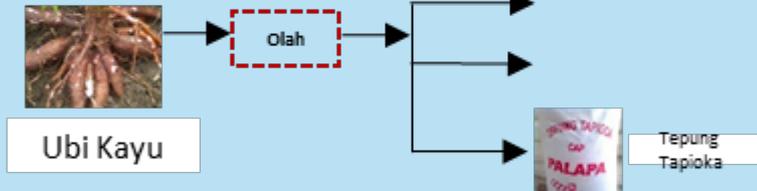


### SUBSISTEM AGRIBISNIS KOMODITAS UBI KAYU

#### Kondisi Eksisting

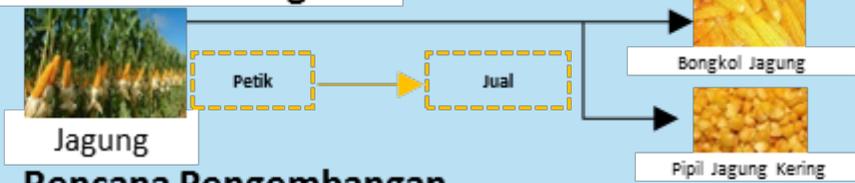


#### Rencana Pengembangan

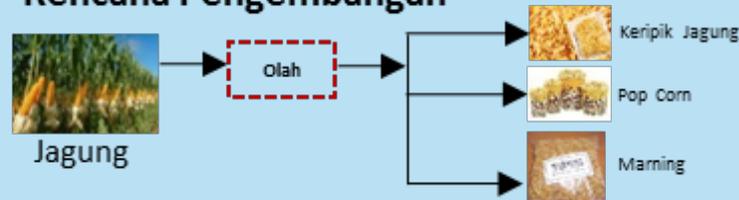


### SUBSISTEM AGRIBISNIS KOMODITAS JAGUNG

#### Kondisi Eksisting



#### Rencana Pengembangan



### SUBSISTEM AGRIBISNIS KOMODITAS PADI

#### Kondisi Eksisting

PETANI ---> PENGUMPUL ---> DISTRIBUSI PRODUK ---> MARKET



#### Rencana Pengembangan

PETANI ---> BERAS ---> DISTRIBUSI PRODUK ---> MARKET



Dalam mewujudkan pengembangan KPPN Labuan Bajo dibutuhkan tahapan agar pengembangan kawasan dapat terlaksana sesuai rencana antara lain:



Pengembangan produksi pertanian eksisting dan komoditas baru di KPPN Labuan Bajo untuk mendukung KSPN Komodo dsk.



Pengembangan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian, yaitu dengan pembangunan serta perbaikan jaringan jalan dan jaringan irigasi.



Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas dan pembangunan pasar.



Mengembangkan kawasan perdesaan Nggorang dengan desa Nggorang sebagai pusat pengolahan hasil pertanian. Pengembangan kawasan perdesaan Nggorang berbasis pertanian.



Pengembangan kelembagaan dan penguatan pemodalan dengan cara pembentukan serta pelatihan kelompok tani dan BUMDES.

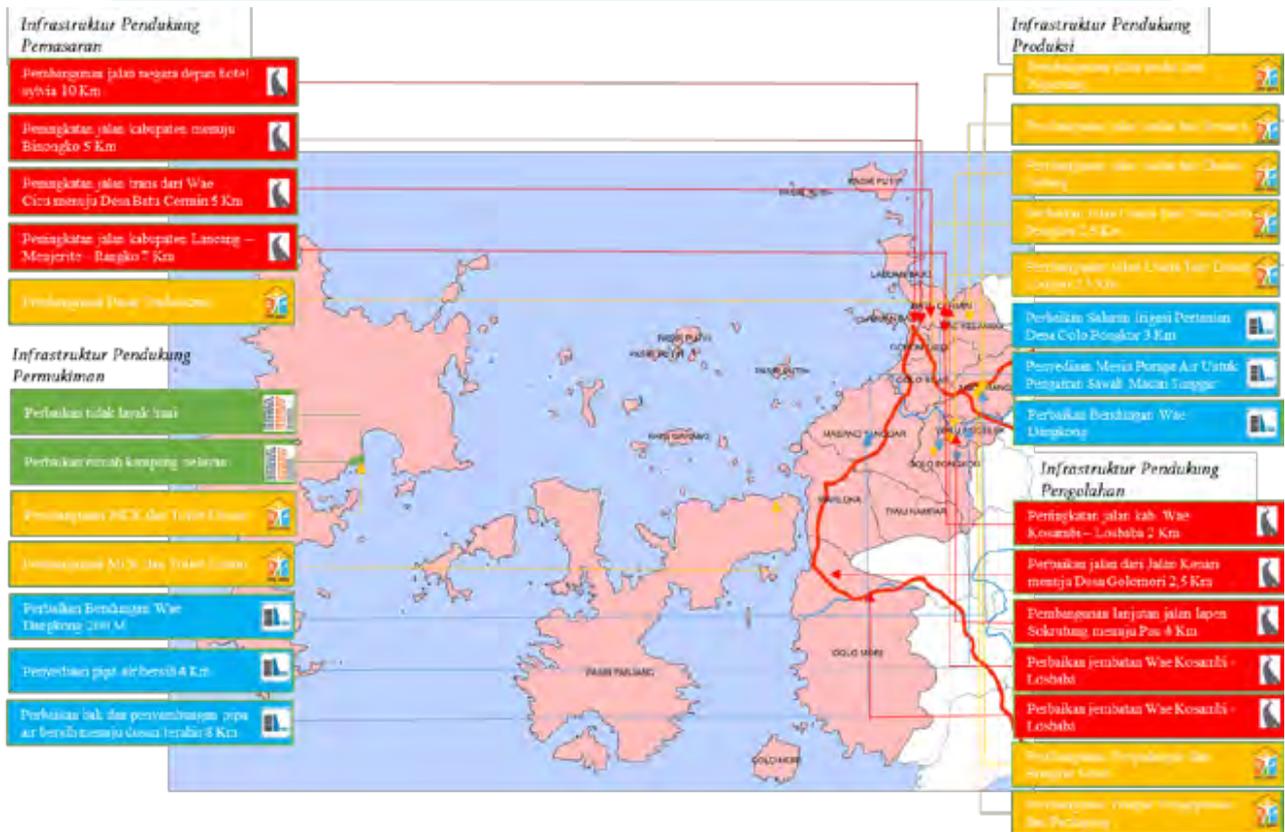


Peningkatan kapasitas SDM disektor pertanian dengan cara pelatihan keterampilan dan penerapan teknologi serta inovasi terbaru.

## Masterplan KPPN Labuan Bajo

Masterplan ini disusun dalam kerangka jangka waktu 10 tahun seperti yang tertuang dalam peta masterplan pengembangan infrastruktur KPPN Labuan Bajo . Pengembangan KPPN Labuan Bajo diharapkan dapat berjalan sesuai rencana.

### PROGRAM UTAMA INFRASTRUKTUR PUPR

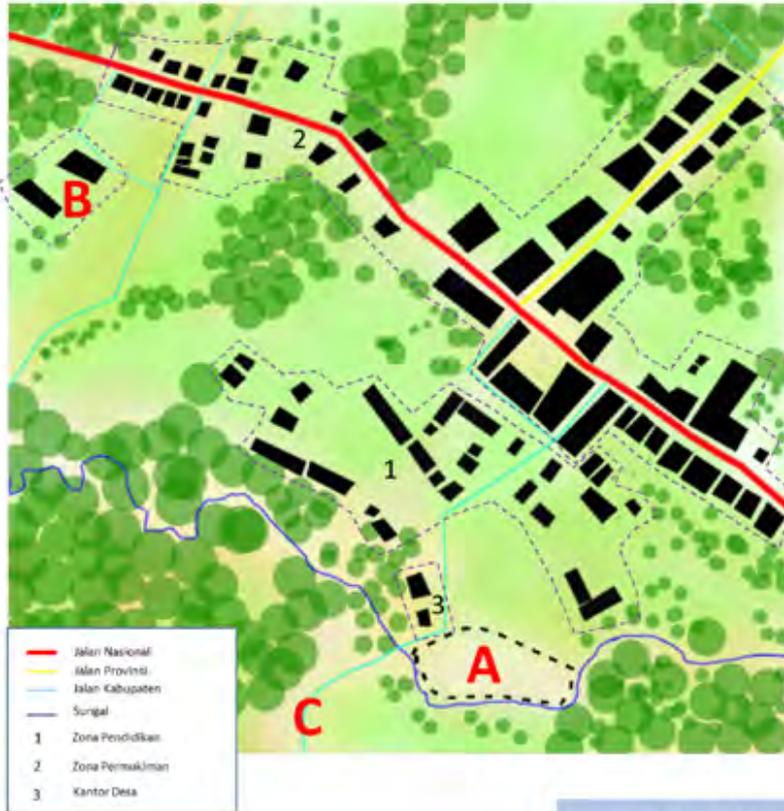


### PROGRAM INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PARIWISATA



# PRA-DED

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN



## PROGRAM PRIORITAS KPPN LABUAN BAJO

- Lokasi : Desa Nggorang (pusat pengolahan)
- Berjarak  $\pm 15$  Km dari Labuan Bajo
- Program Prioritas :
  - A. Pembangunan Pasar
  - B. Revitalisasi Terminal
  - C. Peningkatan Jalan



## PROGRAM PRIORITAS A PEMBANGUNAN PASAR ANALISIS SITE



Kontur Relatif datar



Luas Rencana Pengembangan  $\pm 1$  Ha



Tingkat Keramaian Wilayah Pengembangan Sedang



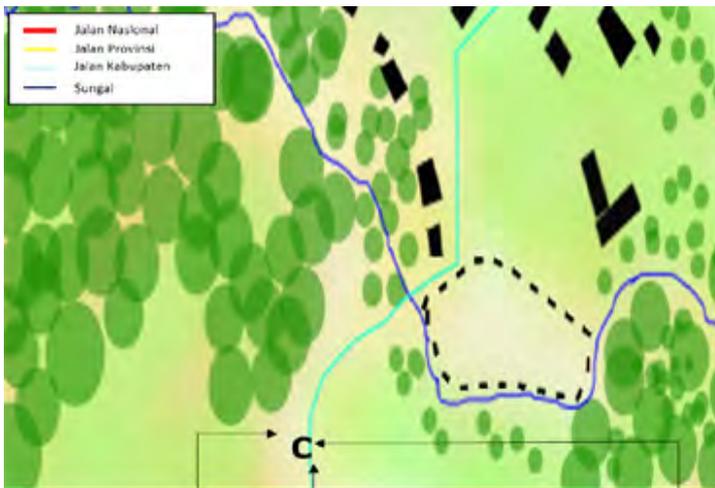
Lokasi berdekatan dengan zona pendidikan



Aksesibilitas kawasan dekat Dengan jalan Kabupaten



Kondisi eksisting site berupa semak belukar dan berbatasan langsung dengan sungai



**ANALISIS SITE**

- Kontur Relatif datar
- Rencana perbaikan jalan kabupaten sepanjang ±5 Km
- Tingkat Keramaian Wilayah Pengembangan Tinggi Karena sering dilalui kendaraan pribadi maupun truk



Kondisi sekitarnya berupa semak belukar dan kebun milik masyarakat



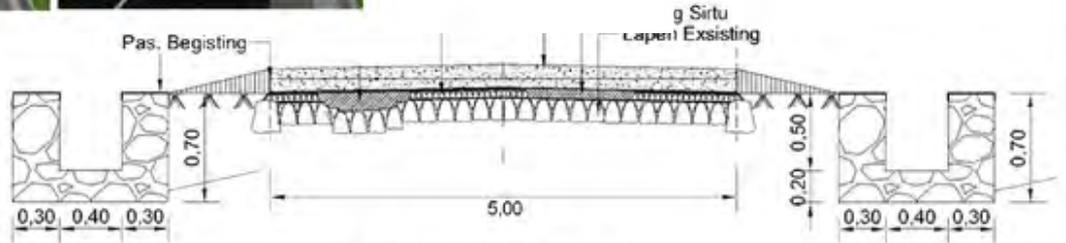
Merupakan Jalan Kabupaten



Kondisi eksisting sudah berupa aspal namun rusak berat



**USULAN JALAN KABUPATEN**



**POTONGAN JALAN**

Penyusunan *masterplan* dan Pra DED ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terdiri dari rapat koordinasi di daerah, rapat koordinasi tingkat pusat, survey lapangan, dan *focus group discussion* (FGD). Diharapkan setelah adanya *masterplan* dan dan Pra DED ini dapat direalisasikan dukungan Kementerian PUPR terhadap kawasan perdesaan, berupa dukungan terhadap peningkatan produktivitas baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kemudian mendukung peningkatan nilai tambah yakni dari pola

petik-jual produksi pertanian menjadi petik-olah-jual, dan mendukung kelancaran pemasaran dengan dukungan konektivitas, selain itu mendekatkan produksi ke konsumen akhir. Dengan dukungan Kementerian PUPR melalui pembangunan infrastruktur yang dibangun Ditjen Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, dan Perumahan diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa.

# Upaya Menghindari Maja dari Ancaman Menjadi Kota Mati

**Aji Noor Muhammad, ST, MT**

*Kepala Sub Bidang Kota Besar dan Kota Baru II  
Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan  
BPIW, Kementerian PUPR*



Sejalan dengan perkembangan global, penduduk dunia terus mengalami penambahan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,2 persen pada tahun 2013 (Miller, 2015). Meskipun di Indonesia laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 sebesar 1,1 persen/tahun (data Badan Pusat Statistik (BPS), 2017) masih tergolong cukup tinggi dibandingkan negara lain di dunia. Sebagian besar penduduk dunia saat ini tinggal di kawasan perkotaan.

Bahkan, sejak tahun 2014 Indonesia telah memasuki Era Kota, di mana 53 persen dari total populasi penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan dan diperkirakan akan meningkat mencapai 71 persen pada tahun 2050 (*Economic and Social Affairs UN*, 2014).

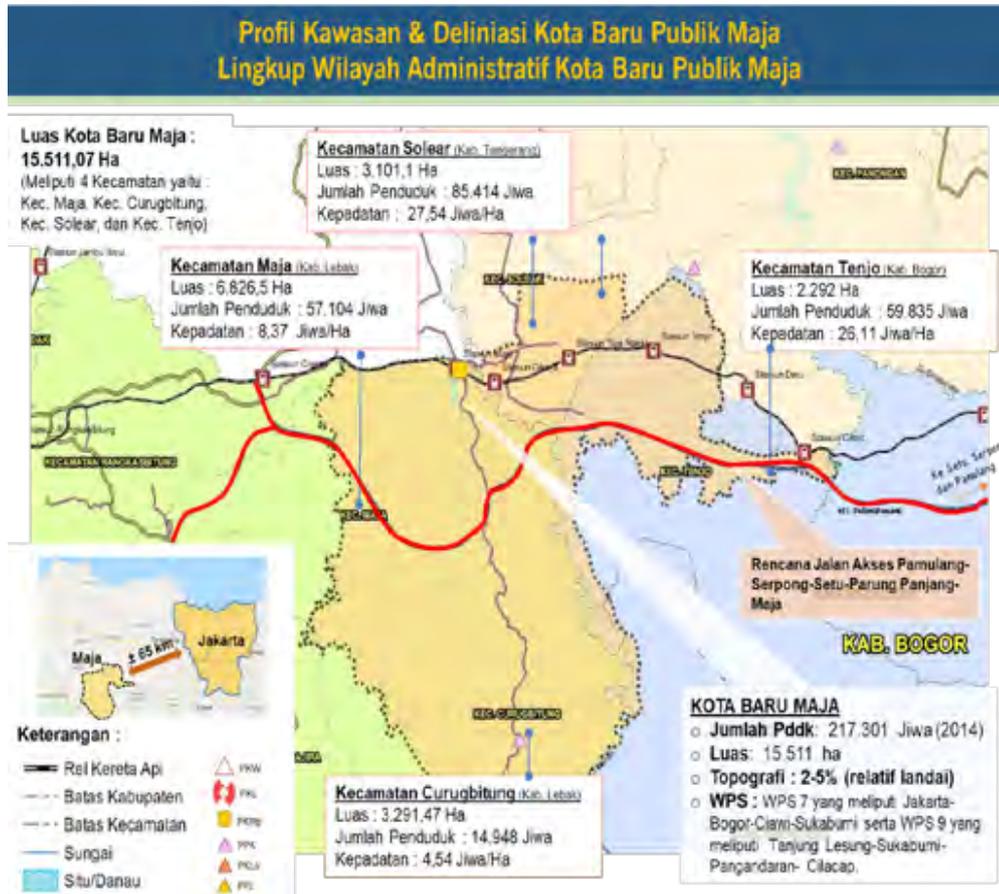
Peningkatan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia yang signifikan turut menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian dan infrastruktur, namun disisi lain ketersediaan lahan perkotaan dan kemampuan daya dukung lingkungan untuk mendukung aktivitas penduduk dan infrastruktur terbatas. Bersamaan dengan kondisi tersebut, sumber daya alam yang

dimanfaatkan oleh manusia sebagian besar sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbarukan. Kawasan perkotaan sebagai tempat tinggal mayoritas penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial budaya, infrastruktur rata-rata memiliki permasalahan bersifat multidimensi dan kompleks. Hal tersebut ditambah dengan peningkatan konsentrasi penduduk di suatu kawasan perkotaan yang semakin besar dimana fenomena urbanisasi dan industrialisasi berjalan secara paralel.

Menyikapi fenomena tersebut, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 mengamanatkan pengembangan 10 Kota Baru Publik yang mandiri dan terpadu. Tujuan pengembangan kota baru sebagai permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (*urban sprawl*) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya.

Namun, apakah semua kota baru yang dicanangkan telah direncanakan secara matang sehingga dalam perkembangannya dapat berfungsi secara optimal atau justru

*\*tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi*



Gambar Deliniasi Kota Baru Maja (Sumber : Studi Masterplan Infrastruktur PUPR Kota Baru Maja, 2016)

malah tidak sesuai rencana atau bahkan justru berkembang mengarah menjadi 'kota mati' (*ghost city*)?

Maja merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang menjadi salah satu kota baru yang dicanangkan dalam RPJMN 2015 – 2019 serta satu-satunya kota baru yang berada di wilayah Pulau Jawa. Perkembangan Maja memiliki sejarah yang panjang, dimana sudah dimulai direncanakan oleh Pemerintah sebagai kawasan perkotaan sejak tahun 1994 yang dulunya dikenal sebagai kawasan Kota Kekerabatan Maja.

Bahkan pada tahun 1998, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat membentuk Tim Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dalam Skala Besar di Wilayah Maja melalui Kepmenpera Nomor 02/KPTS/M/1998 tertanggal 29 Februari 2008.

Pada periode selanjutnya setelah mengalami vakum pengembangan wilayah Maja, pada tahun 2011 melalui Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)* upaya pengembangan Kota Baru Maja kembali muncul.

Dalam dokumen MP3EI tersebut secara eksplisit dicantumkan sebagai proyek “Pengembangan Infrastruktur Kota Baru Maja” dengan rencana pelaksanaan di tahun 2012. Namun dalam perkembangannya, kawasan perkotaan Maja tidak berkembang sesuai rencana karena adanya perkembangan kepentingan dari para pihak, penambahan maupun pengurangan pihak yang memiliki kepentingan, maupun keadaan perekonomian yang di luar kendali para pihak terkait (Muhammad, 2016).

**Tujuan pengembangan kota baru sebagai permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (*urban sprawl*) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya.**

Sebagai tindak lanjut arahan RPJMN 2015 – 2019, telah disusun *masterplan* infrastruktur pada tahun 2016 sebagai arahan bagi unit organisasi Kementerian PUPR dalam merencanakan program infrastruktur sesuai dengan kebutuhan sejalan dengan rencana pengembangan wilayah. Bersama dengan hal tersebut,

telah disepakati komitmen bersama (MoU) antara Pemerintah yakni Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat, Pemerintah Kota/Kabupaten serta para pengembang besar yang telah memiliki izin lokasi pengembangan di wilayah Maja.

Salah satu poin utama dalam penyepakatan antar pihak tersebut adalah rencana pembangunan jalan akses Maja yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR, sedangkan



Gambar Suasana Kota Ordos di China  
(Sumber: [www.businessinsider.sg/ordos-china-ghost-town-2017-5/](http://www.businessinsider.sg/ordos-china-ghost-town-2017-5/))

dari pihak pengembang akan menghibahkan tanah yang akan dilewati jalan tersebut serta pengembang berkomitmen untuk mengembangkan unit rumah tinggal dengan pola hunian berimbang khususnya peruntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam perkembangannya sejak ditandatangani MoU oleh para pihak terkait, memicu pelonjakan harga jual tanah di kawasan Maja dan sekitarnya. Kenaikan harga tanah itu diiringi dengan pembangunan kawasan perumahan oleh beberapa pengembang dengan skala besar. Misalnya perumahan Citra Maja Raya dalam kurun waktu tiga tahun telah menorehkan penjualan lebih dari 12.000 unit rumah.

Dari keseluruhan penjualan hingga awal tahun 2018 telah dilakukan serah terima bangunan sebanyak lebih dari 8.000 unit rumah namun baru sekitar ratusan rumah yang ditempati oleh pemilik rumah. Sesuai deliniasi izin lokasi yang dimiliki oleh seluruh pengembang di kawasan Maja dan sekitarnya seluas 15.511 ha maka kawasan kota baru Maja apabila telah terbangun semua dapat mencapai lebih dari 120 ribu unit rumah tinggal dan dapat menampung penduduk hingga 1,2 juta penduduk. (Studi *Masterplan Infrastruktur PUPR Kota Baru Maja*, 2016).

Rendahnya tingkat penghunian rumah baru yang dikembangkan di kawasan maja memberikan kesan 'dejavu'

seperti mengulang fenomena pengembangan kawasan Maja pada tahun 1994 - 1998. Pada kurun waktu tersebut, dengan dicanangkannya Kota Kekerabatan Maja dan didorong percepatan pembangunannya oleh Pemerintah maka para pengembang berbondong-bondong membangun perumahan di kawasan Maja.

Namun dalam perkembangan kawasan Maja, belum diimbangi dengan pertumbuhan aktifitas perdagangan dan jasa serta tumbuhnya kawasan industri sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Hal ini membuat kawasan tersebut lambat berkembang. Selain itu karena banyaknya konsumen perumahan yang hanya menjadikan unit rumah yang dibeli sebagai media investasi dan tidak dijadikan sebagai tempat tinggal membuat tingkat okupansi hunian menjadi lebih kecil.

Hal tersebut diperparah dengan adanya kondisi krisis ekonomi yang menghantam mayoritas perekonomian di Indonesia sehingga para pengembang sebagian besar berhenti mengembangkan kawasan Maja, karena rumah-rumah yang telah dibangun namun belum dijual menjadi susah untuk dipasarkan. Bahkan sebagian rumah yang telah dibeli oleh konsumen juga tidak sedikit hanya didiamkan saja dan kondisinya rusak karena tidak dirawat.

Fenomena mengenai kota yang tingkat penghuniannya tidak sesuai rencana atau kota mati (*ghost city*) terjadi di China

## Opini

yang sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan kota baru. Pada awal tahun 2000-an, peningkatan kondisi perekonomian negara yang demikian pesat mendorong pemerintah melakukan pembangunan perkotaan dengan harapan menciptakan pusat budaya, ekonomi, dan politik baru. Kota Baru Ordos, juga dikenal sebagai Kangbashi, direncanakan dapat menampung satu juta penduduk dan dikenal karena proyek arsitektur abstraknya yang besar, hunian vertikal, dan tempat olahraga canggih.

Namun karena adanya penerapan pajak properti yang tinggi dan tidak adanya penggerak ekonomi kawasan (*engine of growth*) menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk tinggal menetap di kota tersebut. Pada tahun 2016, sekitar 100.000 orang yang telah tinggal dan bekerja di sana meninggalkan kota dan menyebabkan dua per tiga wilayah kota menjadi kosong tidak berpenghuni. ([www.businessinsider.sg/ordos-china-ghost-town-2017-5/](http://www.businessinsider.sg/ordos-china-ghost-town-2017-5/))

Fenomena perkembangan kota seperti Ordos City tersebut tentu tidak diharapkan oleh negara manapun. Hal tersebut karena negara telah mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk mengembangkan suatu kota dengan harapan kota tersebut dapat memberikan kontribusi pergerakan ekonomi makro suatu negara namun justru tidak memiliki aktivitas

perekonomian apapun karena tidak ada penghuninya. Begitupun terhadap beberapa kota baru yang sedang didorong percepatan pembangunannya oleh pemerintah Indonesia.

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki Pemerintah dan stakeholder dalam mengembangkan beberapa kota baru, seperti Kebayoran Baru, Tebet, Palangkaraya, Banjarbaru, dan

Maja serta belajar dari kegagalan dalam pengembangan kota baru yang dilakukan di berbagai negara, seyogyanya berbagai pihak perlu lebih memperhatikan perencanaan, pembangunan serta pengendalian secara matang dalam rangka pengembangan kota-kota baru agar tidak berpotensi menjadi kota mati.

Dalam studi singkat yang dilakukan oleh penulis, dalam pengembangan kota baru sekurang-kurangnya perlu untuk mempertimbangkan empat faktor, yakni :

### 1. Adanya penggerak ekonomi (*engine of growth*)

Kawasan Kota Baru mandiri perlu memiliki kegiatan utama penggerak ekonomi kota seperti aktifitas perdagangan dan jasa sehingga masyarakat bisa beraktifitas dan mendapatkan penghasilan di lingkungan kotanya.

---

Fenomena mengenai kota yang tingkat penghuniannya tidak sesuai rencana (*ghost city*) terjadi di China yang sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan kota baru.

---



Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menandatangani Kesepakatan Bersama Pengembangan Kota Baru Publik Maja

Sumber: Kemen PUPR



Ilustrasi Kota Jakarta dengan Wisma Atletnya.

Sumber: Kemen PUPR

## 2. Tersedianya infrastruktur perkotaan

Pelayanan air minum, sistem persampahan, pengelolaan air limbah, sistem sanitasi yang memenuhi standar, ruang terbuka hijau cukup dan berkualitas, jaringan listrik serta telekomunikasi menjadi prasarana dasar yang harus sudah terpenuhi untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan. Selain itu, sebagai kota baru mandiri perlu juga memiliki sarana kesehatan, pendidikan serta aksesibilitas yang memadai dengan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai satu kesatuan sistem perkotaan.

## 3. Kelembagaan yang sinergi antar stakeholder dalam pengembangan dan pengendalian kawasan

Dalam pengembangan kota baru perlu adanya mekanisme kelembagaan masing-masing stakeholder yang jelas sehingga berimplikasi pada kontribusi yang sinergi dari berbagai sumber pendanaan terutama dari sektor swasta yang dapat membantu Pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik dasar (rumah sakit, sekolah, pasar, dll) serta penggerak ekonomi kota sehingga kota tersebut dapat mampu membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur perkotaan, pengelolaan serta perawatannya.

## 4. Keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan wilayah

Setiap aktifitas dan pembangunan yang dilakukan dalam pengembangan wilayah kota baru perlu memperhatikan

kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan dan aktifitas manusia serta lingkungan hidup di atasnya sehingga tidak memicu terjadinya bencana lingkungan di kemudian hari.

### Referensi:

Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Departement of Economic and Social Affairs. 2014. World Urbanization Prospects. New York: United Nation

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. 2016. Penyusunan Masterplan dan Development Plan Infrastruktur Kota Baru Maja. Jakarta: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Muhammad, Aji Noor. 2016. Kontestasi Aktor-Aktor dan Implikasinya dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Wilayah Maja. Bandung: MSP, Institut Teknologi Bandung

Miller, G.T., Spoolman, S.E. 2016. Environmental Science, Fifteenth Edition. Boston: Cengage Learning.

Robinson, Melia. 2017. Surreal photos of China's failed 'city of the future'. (Online). (<https://www.businessinsider.sg/> diakses 7 Agustus 2018 pukul 15.20 WIB)

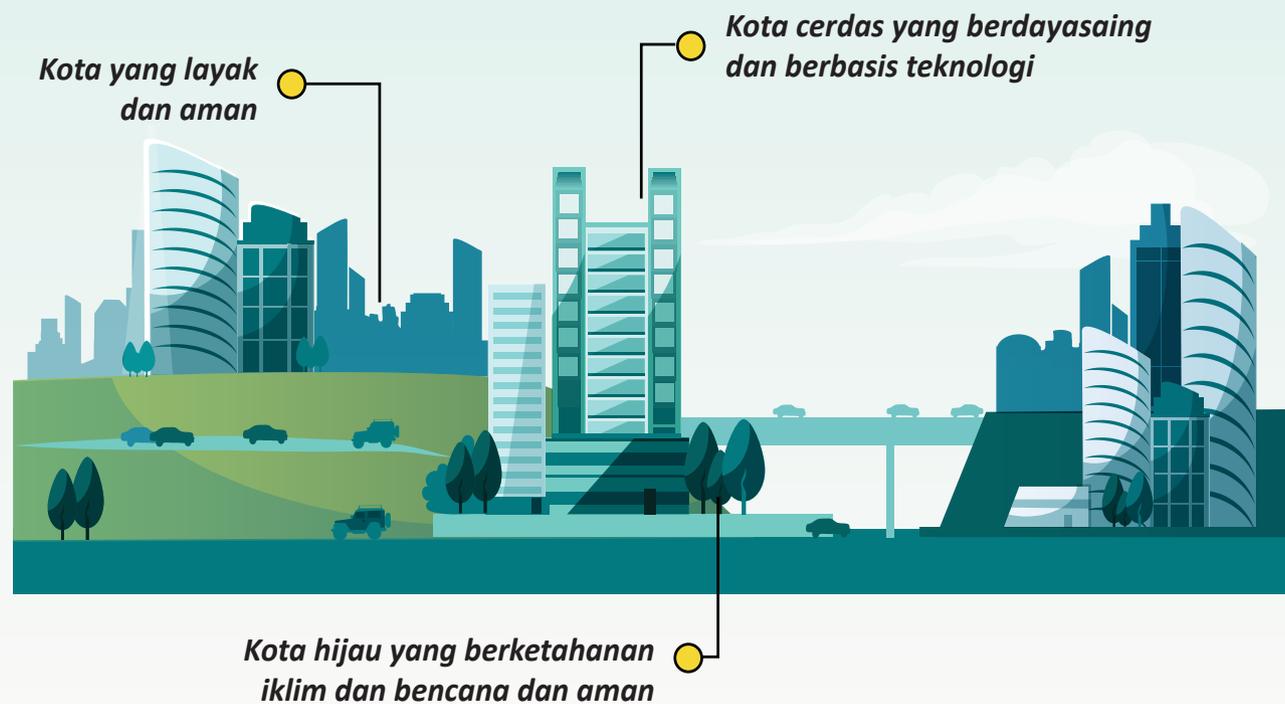


## Kebijakan Pengembangan Kota Berketahanan (*Resilient City*)

Dalam kaitannya dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim, maka ada beberapa kebijakan pengembangan kota berketahanan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2045 kebijakan pengembangan kota berketahanan seperti perwujudan sistem perkotaan nasional, pemenuhan standar perkotaan hingga perwujudan tata kelola kota berkelanjutan. Kebijakan lainnya terkait teknis pembinaan kota berketahanan, manajemen/strategis, dan pilar kota berkelanjutan 2015-2045. Pengembangan kota berketahanan pada akhirnya menuju kota yang berkelanjutan.



### Pilar Kota Berkelanjutan 2015 - 2045





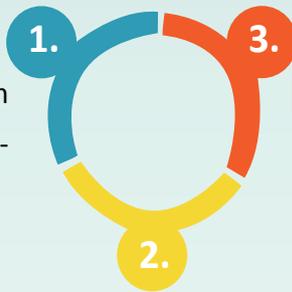
## RPJMN 2015 - 2045

- Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional
- Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)
- Perwujudan Kota Layak Huni, Aman dan Nyaman
- Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana
- Perwujudan Kota Cerdas dan Berdayasaing
- Perwujudan Tata Kelola Kota Berkelanjutan



## Teknis Pembinaan Kota Berketahanan

1. Identifikasi kendala dan permasalahan kota-kota di Indonesia dalam mewujudkan *resilient city*



3. Adanya *masterplan* konsep pengembangan *resilient city* untuk program/kegiatan rencana aksi perwujudan *resilient city*

2. Ide dan konsep *resilient city* untuk pemerintah kota/kabupaten sehingga meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan konsep *resilient city* dalam kebijakan kota



## Manajemen / Strategi

- Menciptakan organisasi, koordinasi, dan anggaran
- *Up-dating* data bahaya/ancaman dan kerentanan serta analisis risiko bencana
- Investasi upaya perlindungan, peningkatan dan ketangguhan infrastruktur
- Adanya regulasi dan perencanaan penggunaan lahan yang tepat
- Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran publik
- Memasang peralatan peringatan dini dan penguatan kapasitas manajemen tanggap darurat

# Keindahan Lain di Bibir Pasifik Indonesia



Siapa yang tidak tahu sebuah pulau kecil yang terletak di Halmahera Utara, di Kepulauan Maluku. Ya! Tepatnya sebuah pulau sekaligus kabupaten definitif baru yang terletak di wilayah Utara di Indonesia, yakni pulau Morotai. Pulau Morotai ini memiliki luas wilayah sebesar 695 mil persegi/ 1800 km<sup>2</sup>, yang diresmikan langsung oleh Menteri dalam Negeri Indonesia pada 29 Oktober 2008 yakni Mardiyanto.

Sebagai pulau yang berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Filipina, Morotai pada jaman dahulu digunakan sebagai basis pertahanan Jepang selama Perang Dunia II. Setelah itu pulau ini diambil oleh sekutu dan digunakan sebagai landasan pesawat untuk menyerang wilayah Filipina dan Borneo Timur. Akan tetapi jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi, Morotai berada di bawah kesultanan Ternate. Oleh sebab itu pulau ini menyimpan banyak sejarah. Pulau yang berada di Wilayah

Pengembangan Strategis (WPS 30) ini, tidak hanya menorehkan guratan sejarah yang membuat pulau dengan julukan "Surga Timur Indonesia" ini terkenal. Akan tetapi kekayaan bawah lautnya juga berhasil membuat para wisatawan datang mengunjungi pulau Morotai.

---

Beberapa destinasi pariwisata yang bernilai sejarah dan juga keindahan bawah laut yang wajib dapat dikunjungi di pulau Morotai ini antara lain Pulau Zum-zum, Pulau Dodola, dan juga Pantai Tanjung Gorango.

---

Beberapa destinasi pariwisata yang bernilai sejarah dan juga keindahan bawah laut yang wajib dapat dikunjungi di pulau Morotai ini antara lain Pulau Zum-zum, Pulau Dodola, dan juga Pantai Tanjung Gorango.

**Pulau Zum – Zum.** Pulau Zum-Zum merupakan salah satu pulau nan

menawan yang berada di kepulauan Morotai, Maluku Utara. Kita hanya memerlukan waktu 15 menit dengan menggunakan *speed boat* dari pelabuhan Morotai. Menurut sejarahnya, Pulau Zum-zum ini merupakan persembunyian Jepang saat Perang Dunia II.

Di pulau ini juga masih tersimpan jejak peninggalan Jepang yang dapat ditelusuri oleh para wisatawan. Selain itu di Pulau Zum-Zum ini lah terdapat Monumen Jenderal MacArthur, yang merupakan panglima pasukan perang pasifik.

Panorama yang indah dan cantik di Pulau Zum-Zum di Morotai ini menjadi salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Indonesia Timur yang terlihat mempesona dan merupakan tujuan wisata bahari yang lengkap dengan berbagai aktivitas wisata seperti *snorkeling*, *diving*, dan berkeliling menggunakan *speed boat*. Tidak hanya itu saja yang dapat kita nikmati di Pulau Zum-Zum ini,



Pantai Morotai

Sumber: BPIW

melainkan bisa menikmati hamparan Laut Morotai yang sangat indah. Luas pasir putih pantai ini juga menjadi tempat peristirahatan yang cukup bagus setelah melakukan *trekking* ke dalam hutan.

**Pulau Dodola.** Pulau eksotis, dengan karakteristiknya yang sangat menawan dan terletak di kepulauan Morotai ini adalah Pulau Dodola. Perjalanan yang ditempuh menuju Pulau Dodola ini memakan waktu sekitar 20 menit menggunakan *speed boat* dari Daruba. Pulau ini secara geografis terbagi menjadi dua yakni Dodola Besar dan Kecil.

Keunikan dari kedua pulau ini adalah dipisahkan oleh air laut dan hanya tersambung pada saat laut sedang surut dan membentuk jalan pasir. Di Pulau Dodola ini memiliki lebih dari 13 spot olah raga selam, dan juga pemandangan bawah laut yang sangat indah sehingga menjadikan pulau ini sebagai salah satu destinasi wisata bagi wisatawan yang menyukai *snorkeling* dan *diving*. Tidak heran jika keindahan

pasir pantainya yang putih dan air laut yang jernih merupakan destinasi wisata yang sangat berharga dan harus dijaga kelestariannya.

**Tanjung Gorango.** Jika berlibur ke Morotai, sempatkan mengunjungi destinasi yang terletak di antara Desa Gorua dan Korago, kecamatan Morotai Utara, Tanjung Gorango. Tanjung Gorango terletak 90 kilometer dari Daruba, ibu kota Kabupaten Pulau Morotai. Perlu tiga jam berkendara dengan kendaraan roda empat, dan dua jam dengan sepeda motor. Jalan Daruba – Tanjung Gorango sebagian beraspal dan lainnya masih tanah. Saat kemarau, jalan tanah berdebu.

Di musim hujan, jalan tanah berubah menjadi bubur. Letak Tanjung Gorango yang terpencil membuat pengunjung tidak akan menemukan fasilitas apapun di tempat ini.

Hanya ada satu moda transportasi umum dengan rute Daruba-Tanjung Sopi, tapi waktu tempuh lebih lama. Hamparan pasir di tanjung Gorango

luas dan panjang. Butiran pasir tidak terlalu halus, dan ombak tidak terlalu tinggi membuat kita sangat menikmati keindahan alam yang ada di Tanjung Gorango ini. (**indira/** berbagai sumber)



Pulau Dodola

Sumber: BPIW

# Inilah Enam Bendungan Terbesar yang Diresmikan dalam Tiga Tahun Terakhir

Pemerintah Indonesia saat ini dikenal giat melakukan pembangunan infrastruktur. Tidak hanya, jalan bebas hambatan (jalan tol), perumahan dan permukiman, namun juga bendungan. Bendungan memiliki banyak

fungsi dalam kehidupan manusia di antaranya irigasi sawah, penyediaan air baku, dan sumber energi (PLTA). Berikut adalah enam bendungan yang diresmikan di tiga tahun terakhir ini.



## Bendungan Teritip

*Bendungan Teritip  
Sumber: Kemen PUPR*

Bendungan ini merupakan salah satu bendungan yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Mulai dibangun tahun 2014, pembangunan bendungan ini rampung pada tahun 2016 dan diresmikan tahun 2017. Proses pengisian bendungan ini pun telah selesai dan diprediksi bisa dioperasikan di akhir tahun 2018.

Bendungan yang memiliki kapasitas tampung sebesar 2,43 juta meter kubik ini siap dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan air baku Kota Balikpapan yang mengalami kekurangan. Kebutuhan air baku Kota Balikpapan sendiri mencapai 1.600 liter/detik dimana saat ini baru bisa dipenuhi 1.000 liter/detik dari Bendungan Manggar.



*Bendungan Raknamo*

*Sumber: Kemen PUPR*

## Bendungan Raknamo

Bendungan yang terletak di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang ini mulai dibangun tahun 2014. Bendungan yang dibangun di atas lahan seluas 245,39 hektare ini diharapkan menjadi salah satu solusi permasalahan kebutuhan air di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian di provinsi tersebut. Diperkirakan rampung dalam waktu lima tahun, akan tetapi selesai lebih cepat, yaitu di akhir tahun 2017 dan telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Selasa, 9 Januari 2018.

## Bendungan Tanju

Bendungan Tanju berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya di Kabupaten Dompu. Dibangun tahun 2015, bendungan ini rampung di tahun 2018, dan diresmikan pada 30 Juli 2018. Proses peresmian ditandai dengan pembubuhan tandatangan oleh Jokowi. Bendungan dengan kapasitas sebesar 18 juta meter kubik ini akan segera memberikan irigasi air ke 2.250 hektar lahan lainnya, menyediakan pasokan air baku sebesar 0,05 meter kubik/detik, dan menghasilkan listrik sebesar 0,50 MW.



*Bendungan Tanju*

*Sumber: Kemen PUPR*

## Bendungan Jatigede

Bendungan yang terletak di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sumedang, ini direncanakan sejak zaman Hindia Belanda. Dimulai dibangun tahun 2008. Bendungan ini diresmikan tahun 2015 serta beroperasi penuh di tahun 2017. Bendungan dengan kapasitas tampung 979,5 juta meter kubik ini merupakan bendungan terbesar kedua di Indonesia. Manfaat dari waduk ini, yaitu untuk mengairi persawahan hingga seluas 90.000 hektare dan sumber air baku yang bisa digunakan untuk kepentingan wilayah di Sumedang, Majalengka, hingga ke Cirebon, dengan kecepatan sebesar 3,5 kubik per detik.

Selain dua manfaat utama tersebut bendungan ini juga dimanfaatkan untuk sumber tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas hingga 110 megawatt (MW), pengendalian banjir di 14 ribu hektare area dan menjadi objek wisata.



Bendungan Jatigede

Sumber: Kemen PUPR



Bendungan Nipah

Sumber: Kemen PUPR

## Bendungan Nipah

Bendungan yang terletak di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, ini diresmikan pada 19 Maret 2016. Mulai dibangun tahun 1973 dan pembangunan bendungan ini sempat terhenti di tahun 1993, namun dimulai lagi tahun 2008.

Waduk Nipah mempunyai daya tampung 4 juta meter kubik, dengan areal irigasi 1.150 hektar yang dibagi menjadi dua pola tanam. Pola tanam Padi-Palawija-Palawija berada di 925 hektar yang merupakan areal baru. Sementara sisanya yakni 225 hektar merupakan areal sawah lama yang sebelumnya telah diairi oleh Bendung Montor dengan pola Padi-Padi-Palawija.

## Bendungan Titab

Bendungan yang terletak di Provinsi Bali ini mulai baru dibangun di tahun 2011 sampai 2015. Sebagai bendungan terbesar di Pulau Dewata, bendungan ini mampu menampung air sebanyak 12 juta meter kubik. Air dari waduk waduk dipakai untuk mengairi irigasi sebanyak 1.700 hektar dan air baku di Kabupaten Buleleng. (Syifa)



Bendungan Titab

Sumber: Kemen PUPR

# BLOK BETON 3B, TEKNOLOGI PENAHAN GELOMBANG PANTAI MODULAR

Blok Beton 3B

Sumber: Kemen PUPR

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Sumber Daya Alam (Ditjen SDA) bahwa kerusakan pantai di Indonesia saat ini ± sepanjang 17000 km. Kerusakan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik alam maupun akibat dari kegiatan manusia sendiri.

Faktor alam yang dapat menyebabkan kerusakan pantai tidak lain adalah pengikisan pantai yang disebabkan oleh kekuatan gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak atau lazim disebut abrasi.

Penyusutan area pantai dan terganggunya kegiatan nelayan karena gelombang dan arus laut yang biasanya membantu jalur berangkat dan pulang nelayan menjadi lebih tidak beraturan dikarenakan kondisi pantai yang rusak merupakan sebagian kecil dari dampak yang akan ditimbulkan oleh abrasi.

Sedangkan faktor manusia yang berkontribusi terhadap rusaknya kelestarian pantai adalah kegiatan penambangan pasir dengan mengeruk sebanyak mungkin serta dalam intensitas yang tinggi dapat mengurangi volume pasir di lautan bahkan mengurasnya sedikit demi sedikit. Keadaan itu berpengaruh langsung terhadap arah dan

kecepatan air laut yang akan langsung menghantam pantai. Ketika ombak yang kembali ke laut tidak membawa pasir, air pantai akan lebih ringan dari biasanya sehingga ia dapat lebih keras dan lebih cepat menghantam pantai sehingga proses yang demikian turut memperbesar kemungkinan terjadinya abrasi.

Jika abrasi dibiarkan maka hantaman-hantaman kerasnya gelombang laut pada daerah pantai dapat

---

Teknologi pengaman pantai dengan Blok Beton 3B sebagai salah satu dari sekian banyak inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh Balitbang akan semakin berkembang dan dapat membantu menangani kerusakan tebing pantai dengan keunggulan yang lebih baik lagi

---

menggetarkan bebatuan dan tanah sehingga keduanya perlahan akan berpisah dari wilayah daratan dan menjadi bagian yang digenangi air. Kondisi ini tidak hanya merugikan sektor pariwisata, akan tetapi juga secara langsung mengancam keberlangsungan hidup penduduk di sekitar pantai yang memiliki rumah atau ruang usaha.

Menyikapi kedua faktor utama tersebut, faktor alam yang paling sulit untuk dikendalikan serta tidak dapat diperkirakan. Untuk itu diperlukan solusi cerdas sebagai upaya pencegahan. Telah banyak usaha perbaikan yang dilakukan baik dengan langkah struktur maupun non-struktur. Salah satu cara yang dianggap mampu menanganinya adalah dengan membuat dinding pantai atau *revetment*.

*Revetment* ialah bangunan yang memisahkan daratan dan perairan pantai, yang terutama berfungsi sebagai pelindung pantai terhadap erosi dan limpasan gelombang ke darat. Namun permasalahan yang kemudian dihadapi untuk menerapkan *revetment* adalah karena pada saat ini di Indonesia batu besar tersebut sudah berkurang sehingga perlu diganti dengan blok beton untuk memenuhi kebutuhan material yang beratnya memadai.

Dengan berkembangnya teknologi, bahan *revetment* yang tadinya berupa batu alam dengan bobot lebih dari 200kg sudah jarang ditemui di lapangan, sementara di lapangan berat batu tersebut masih dibutuhkan sehingga para peneliti (Ahli Teknik Pantai) berupaya untuk memenuhi



Kondisi akibat gelombang laut



Sumber: Balitbang Kemen PUPR

kebutuhan bahan tersebut dengan membuat model yang terbuat dari blok beton bertulang dengan berat yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemodelan *revetment* tidak sekedar memenuhi berat beton saja melainkan ditinjau dari beberapa faktor sehingga bahan tersebut dapat berfungsi dan awet untuk beberapa tahun sesuai dengan rencana dan karakteristik gelombang pada pantai yang diteliti.

Sebagai solusi untuk tetap dapat membangun *revetment*, Balai Pantai Puslitbang SDA Balitbang Kementerian PUPR melakukan terobosan dengan mengembangkan dan memodifikasi *revetment* yang sudah ada menjadi *revetment* Blok Beton Berkait, Berongga, Bertangga (3B) yang menggunakan sistem modular. Dengan sistem tersebut dapat memudahkan pengerjaan bangunan dan lebih efektif karena beton dapat di fabrikasi dan dicetak di luar lokasi pengerjaan. Selain itu, dengan wujudnya yang terbagi dalam modul-modul akan menjaga kualitas dari bangunan karena apabila terdapat kerusakan pada salah satu modul maka hanya bagian yang rusak saja yang harus diganti tanpa mengganggu bagian yang lainnya.

Keunggulan *revetment* dengan blok beton bertulang tipe 3B dibanding dengan *revetment* lainnya adalah mempunyai stabilitas yang lebih tinggi. Hasil pengujian di laboratorium, armor blok beton bertulang tipe 3B mempunyai koefisien Stabilitas ( $K_0$ ) sebesar 53. Struktur Blok Beton ini sebelumnya telah dikaji di laboratorium untuk mengetahui stabilitas kemampuan menahan gelombang pada laboratorium Balai Litbang Pantai dengan skala 1 : 10 dan dibuat Prototipe skala 1 : 1 di Pantai Banyupoh Kecamatan Gerokgak Buleleng Bali, tepatnya pantai di

depan tempat peribadatan (Pura Taman) pada tahun 2009. Pemilihan lokasi penerapan tersebut didasari dengan fakta bahwa pantai merupakan tempat mata pencaharian utama dari penduduk Bali, dan tidak lagi dipungkiri bahwa Pulau Bali sangat terkenal dengan pesona pantainya. Selain itu, mayoritas penduduk Bali yang menganut agama Hindu erat kaitannya dengan ritual keagamaan dengan melibatkan laut. Dengan latar belakang itu pula mengapa struktur bangunan pengaman pantai dengan Blok Beton 3B menyerupai tangga adalah selain memperhatikan segi estetika pantai juga untuk memudahkan para wisatawan dan penduduk yang akan melakukan ibadah menuju pantai.

Dari sisi teknis, dengan sturuktur bangunan berupa tangga akan lebih mudah meredam sekaligus memecah ombak yang datang karena terdapat sekat dan rongga. Setelah prototipenya selesai dikaji, pada tahun 2010 telah dibuat buku teknologinya yang ditandatangani oleh Menteri PUPR dan sampai dengan tahun 2017 konstruksi tersebut masih baik dan masih berfungsi. Kemudian tahun 2015 sampai dengan 2016 telah dibuat pedoman pelaksanaannya.

Diharapkan dengan dapat diaplikasikannya teknologi ini secara massal akan membantu menjaga kelestarian pantai sebagai garis terujung dan harta bagi negeri ini. Dan teknologi pengaman pantai dengan Blok Beton 3B sebagai salah satu dari sekian banyak inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh Balitbang akan semakin berkembang dan dapat membantu menangani kerusakan tebing pantai dengan keunggulan yang lebih baik lagi. **(Dara)**



Sumber: Balitbang Kemen PUPR

# UPACARA BENDERA PERINGATAN KESAKTIAN PANCASILA

Kementerian PUPR menggelar upacara bendera untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2018. Bertindak selaku Pemimpin Upacara, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid. Kegiatan itu diikuti seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kementerian PUPR, termasuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Berikut dokumentasi upacara tersebut.



Barisan BPIW saat upacara



Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat memimpin upacara



Aksi Korps musik Kementerian PUPR



Aksi penggalangan dana untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu



Pembacaan Pancasila

# RAPAT DENGAR PENDAPAT KEMENTERIAN PUPR DENGAN KOMISI V DPR RI



Kepala BPIW, Hadi Sucahyono (kiri) saat mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI

Kementerian PUPR termasuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, 7 September lalu. Jajaran pimpinan Kementerian PUPR dipimpin langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Sedangkan puluhan anggota dewan dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis. Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) dalam Nota Keuangan RPABN Tahun Anggaran 2019. Berikut beberapa potret kegiatan tersebut. (Hendra)



Suasana diskusi di ruang rapat Komisi V DPR RI



Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (depan, tengah) saat memberikan penjelasan terkait program Kementerian PUPR



Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerima data terkait infrastruktur di Jambi dari Anggota Komisi V DPR RI, Saniatul Latifa



Jajaran pimpinan Komisi V DPR saat memberikan pandangannya terkait infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR.

# Obras

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

## BANG EGI



### Sinkronisasi Program & Pembiayaan





## PERTANYAAN

1. Saat ini BPIW sedang menyusun RPJMN berapa untuk periode tahun berapa?
2. Sebutkan tema RPJMN IV!
3. Sebutkan 2 tujuan Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023!

## KETENTUAN

Dua orang pemenang akan mendapatkan *souvenir cantik* dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : [humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id). Jawaban juga dapat disampaikan melalui **WhatsApp No: 0812-9897-4748** disertakan **scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir**. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 34, Oktober 2018.

## JAWABAN KUIS EDISI 32

Jawaban :

1. - KEK: Kawasan Ekonomi Khusus  
- KSPN: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional  
- KI: Kawasan Industri
2. Perpres No. 58 tahun 2017
3. Penyelenggaraan jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Rekonstruksi Jalan, Rekonstruksi jalan bts kota Cilegon-Cibaliung, dan Citeurep-Tanjung Lesung.

## PEMENANG KUIS EDISI 32

1. Istiqomah  
Perum Purnawira, Purbalingga.
2. Alfi Cena  
Kampung Cipeundeuy, Tarajusari,  
Banjaran , Kab. Bandung





# MEMBINA HUBUNGAN BAIK DENGAN REKAN KERJA

Tidak dipungkiri bahwa setiap harinya tentu kita mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dan berinteraksi dengan teman-teman kerja dibanding dengan keluarga. Dari pagi hingga menjelang malam, mereka lah orang-orang yang selalu ada di sekitarmu. Itulah sebabnya, kita perlu membina hubungan baik, dengan temen-teman rekan kerja kalian. Berikut tips membina hubungan baik dengan rekan kerja diantaranya:

### 1. Selalu Jujur dan Katakan Apa Adanya

Kepercayaan dan kejujuran itu sangat penting dalam membangun relasi dengan baik. Jangan sungkan untuk bertanya pada teman kerja kalau kita tidak mengerti cara mengoperasikan mesin fotokopi kantor atau hal-hal lainnya. Dalam dunia kerja sudah pasti ada beberapa masalah dengan rekan kerja, tentunya yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal tersebut sudah biasa terjadi. Yang terpenting adalah selalu jujur kepada rekan kerja. Kalau ada masalah atau sekedar komunikasi biasa, tetap jujur dan bicara apa adanya.

### 2. Berikan Senyum dan Keramahan

Ketika masuk kantor di pagi hari,

tersenyumlah dan sapa semua orang. Bersikap ramah dan terbuka. Hal ini dapat dilakukan ketika jam kerja maupun di luar jam kerja. Salam dan sapa sederhana ini dapat menambah keakraban anda bersama dengan rekan-rekan kerja.

### 3. Menghargai dan Memahami Rekan Kerja

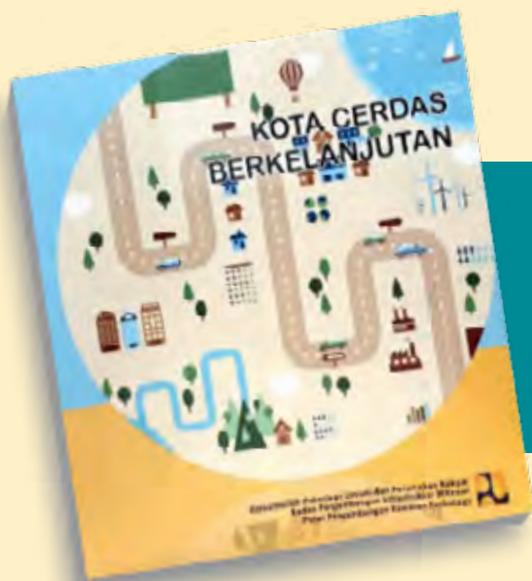
Jika kita melihat seseorang merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, ada baiknya untuk membantu mereka agar kembali mendapatkan kepercayaan untuk dirinya. Jadilah orang yang menyenangkan dengan bersikap sopan, agar orang lain pun merasa nyaman. Untuk dapat memulai percakapan dan melakukan pendekatan kepada rekan kerja, tentu anda harus memahami bagaimana kepribadiannya terlebih dahulu. Dengan mengetahui kepribadiannya, anda dapat mengambil langkah bagaimana untuk melakukan pendekatan dengannya. Untuk mengetahui kepribadian rekan kerja, anda dapat mengamati dari jauh bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan ketika di kantor atau cara berkomunikasi kepada satu sama lain.

### 4. Menjadi Pendengar yang Baik Saat Rekan Kerja Menceritakan Kisah Mereka

Saat berada di kantor, mengobrol dengan saling menceritakan kisah atau permasalahan satu sama lain menjadi hal yang lumrah. Jadilah pendengar yang baik dengan membiarkan lawan bicaramu ketika sedang menyelesaikan cerita mereka. Jika tiba saatnya, giliran kamu yang bergantian untuk cerita. Menjadi Pendengar yang baik merupakan hal penting dalam menjalin hubungan yang harmonis bersama rekan kerja.

### 5. Jangan Menggosip

Tujuan anda membangun hubungan baik dengan rekan kerja adalah untuk membangun ikatan baik dengan sesama rekan kerja, untuk itu jangan lakukan hal yang sebaliknya. Jangan pernah membicarakan orang lain kepada rekan kerja, karena bisa jadi anda dianggap sebagai tukang gosip. Sebaliknya, jika rekan kerja anda menceritakan salah satu rekan kerja yang lain, jangan pernah menyebarkan hal tersebut ke seluruh lingkungan kantor karena akan menimbulkan bibit-bibit permusuhan didalam lingkungan kantor. **(Indira/berbagai sumber)**



## Kota Cerdas Berkelanjutan sebagai Salah Satu Kebijakan Pengembangan Kawasan Perkotaan

Judul Buku :

**Kota Cerdas Berkelanjutan**

Penulis :

**Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan**

Penerbit :

**Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  
Kementerian PUPR**

Tahun Terbit : 2016

Jumlah Halaman: 142 halaman

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi dalam beberapa dekade ke depan dengan pola pemukiman saat ini, telah dan akan menghabiskan banyak lahan. Oleh karena itu kota perlu menentukan arah bentuknya, apakah menyebar/*sprawl*, terfragmentasi/segregasi, atau kompak/*compact*. Kota yang tidak kompak banyak menimbulkan kerugian dan kerusakan lingkungan yang meluas, sehingga pilihan bentuk kota yang kompak menjadi solusinya.

Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan konsep kota yang padat lahan (*compact city*) yang dalam penataan ruang dapat menyediakan lahan kota untuk pelayanan masyarakat dengan menetapkan aturan berwawasan lingkungan, penyediaan RTH, pengelolaan sampah dan limbah ramah lingkungan, pengelolaan air permukaan, pemanfaatan sumber energy yang efisien dan ramah lingkungan, penerapan bangunan hijau, transportasi yang berkelanjutan, serta pemberdayaan komunitas. Ke-8 hal tersebut, disebut sebagai atribut kota cerdas berkelanjutan.

Untuk melengkapi 8 atribut KCB terdapat 2 atribut pendukung yakni penguatan lembaga pemerintahan dan pengembangan kegiatan perekonomian yang ramah lingkungan. Kota Cerdas Berkelanjutan juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Buku ini memaparkan salah satu tugas Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR sebagai penyusun kebijakan teknis dan strategi keterpaduan, oleh karena itu dapat meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan serta memperkaya khazanah keilmuan dalam merencanakan, membangun, dan mengelola kota serta wilayah secara terpadu.

Buku ini terbagi atas 13 bagian, yaitu:

Bagian 1: Kebijakan Pengembangan Kawasan Perkotaan

Bagian 2: Kota Hijau Sebagai Langkah Awal Menuju Kota Cerdas Berkelanjutan

Bagian 3: Kota Cerdas Berkelanjutan

Bagian 4: Atribut Kota Cerdas Berkelanjutan

Bagian 5: Kampung Peunayong Sebagai Kawasan Hijau Pusaka di Banda Aceh

Bagian 6: Penataan Kawasan Purus: Menuju Kota Cerdas Berketahanan di Padang

Bagian 7: Kel. Blotongan dan Kel. Sidorejo Lor untuk Salatiga Hijau Berketahanan

Bagian 8: Kota Prigi yang Hijau dan Berketahanan di Kab. Trenggalek

Bagian 9: Kampung Ketupat, Potret Kampung Hijau Pusaka di Kota Banjarmasin

Bagian 10: Kawasan Hijau Pusaka Benteng Keraton di Kota Bau-Bau

Bagian 11: Konsep Hijau Cerdas Kel. Bulotadaa di Kota Gorontalo

Bagian 12: Kawasan hijau Berketahanan untuk Kel. Wainitu & Kudamati, Kota Ambon

Bagian 13: Dokumen Kota Cerdas Berkelanjutan

Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat seta nuansa baru dalam pengembangan kota dan wilayah di Indonesia. **(Mutri)**

“Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan konsep kota yang padat lahan (*compact city*) yang dalam penataan ruang dapat menyediakan lahan kota untuk pelayanan masyarakat dengan menerapkan 8 atribut kota cerdas.”



# Produk Perencanaan dan Program BPIW Idealnya Jadi Rujukan Kebijakan Nasional

M. Salahudin Rasyidi ST., MT

**B**adan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di seantero negeri. Pasalnya, BPIW berperan untuk memastikan terwujudnya keterpaduan program pembangunan infrastruktur PUPR.

Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat BPIW Kementerian PUPR, M. Salahudin Rasyidi mengatakan, idealnya produk perencanaan & program yang dihasilkan BPIW bisa menjadi rujukan untuk kebijakan Direktif Presiden, Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga program tahunan PUPR.

“Artinya program yang dirumuskan BPIW ini dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan Direktif Presiden, Menteri, DPR/DPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga Pra Konsultasi Regional,” ujar pria yang akrab disapa Pak Didin ini. Ayah dari dua anak ini mengakui, untuk mencapai kondisi ideal tersebut memang tidak mudah membalikan telapak tangan. “Kendati begitu, kami (Bagian Program dan Evaluasi,red) Sekretariat BPIW senantiasa berupaya melakukan banyak hal untuk dapat mendekati kondisi ideal,” jelasnya. Ia mencontohkan, mulai dari merumuskan rancangan kegiatan BPIW yang mampu memprediksi kebutuhan perencanaan infrastruktur wilayah, melakukan koordinasi dengan Kementerian & Lembaga terkait,

melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di BPIW dan lainnya.

Sumber: Dok. BPIW

Menurut pria lulusan Magister Studi Pembangunan di ITB ini, BPIW sebagai organisasi unit kerja Eselon I yang baru berdiri tiga tahun ini tentunya perlu terus melakukan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan kinerja. Terlebih, dari sejarahnya SDM BPIW ini merupakan gabungan dari berbagai unit organisasi (Unor) di Kementerian PUPR.

“Paling banyak memang alumni unor Ditjen Penataan Ruang yang cara berfikirnya lebih makro dan bersifat arahan dan norma-norma, namun saat ini di BPIW dituntut untuk lebih bumi dan siap untuk diimplementasikan oleh unor pelaksana fisik. Untuk menyesuaikan cara berfikir dari Tata Ruang memang perlu proses. Begitu juga SDM dari unor lain yang bertugas di BPIW, perlu penyesuaian

Untuk menyesuaikan cara berfikir dari Tata Ruang memang perlu proses. Begitu juga SDM dari unor lain yang bertugas di BPIW, perlu penyesuaian berpikir.”

berpikir.” ungkap pria lulusan Teknik Lingkungan 1996, Institut Teknologi Bandung (ITB).

Guna mendorong peningkatan kinerja BPIW, pria yang dikenal ramah ini, melakukan beberapa upaya dengan membangun soliditas internal pada masing-masing, bekerja secara matriks dan tidak kaku hanya sebatas melaksanakan tugas serta bekerja tuntas. Menurutnya, kinerja organisasi harus terus meningkat, untuk itu dimulai terlebih dahulu di lingkungan bidangnya, seperti kekompakan, kerjasama yang baik, dan lainnya. **(Daris)**



Foto karya Salahudin Rasyidi



Salahudin

## Hobi Motret Berawal dari Kamera Ponsel

Saat waktu luangnya, pria asal Kota Gudeg ini mempunyai hobi memotret alias fotografi. Ia menuturkan, hobinya tersebut telah serius dilakoninya beberapa tahun belakangan.

Sebelumnya, pria berperawakan tinggi itu mengakui, kesukaannya terhadap fotografi berawal dari memotret menggunakan kamera ponsel yang kemudian diunggah ke media sosial. Namun, lama-kelamaan, dirinya merasa tak puas dengan kualitas kamera ponsel, sehingga beralih menggunakan kamera profesional.

Di sela-sela kesibukannya, seperti ketika sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota, ia

memanfaatkan momen tersebut untuk berburu foto yang bagus.

“Eksplornya memang suka ke daerah-daerah baru, pada saat ada waktu luang di tengah kegiatan dinas,” terang Didin.

---

Eksplornya memang suka ke daerah-daerah baru, pada saat ada waktu luang di tengah berdinas,” terang Didin.

---

Di samping itu, Didin mengaku, untuk menjaga keakraban dan mengusir rasa jenuh dirinya biasa melakukan makan di luar dengan keluarga. “Makan di luar itu tidak perlu yang terlalu mahal, namun yang penting menggembirakan dan keluarga terasa semakin

akrab dan hangat,” terangnya.

Ia bercerita, hal tersebut biasa dilakukan saat ada liburan akhir pekan. “Iya kita biasanya pergi ke tempat makan yang dekat-dekat saja,” terangnya. **(Daris)**

**Segenap  
Jajaran Pimpinan dan Staf  
BPIW Kementerian PUPR**

# **Turut Berduka Cita**

**Atas bencana gempa bumi dan  
tsunami di Palu, Donggala, dan  
Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)  
KEMENTERIAN PUPR**

